

# DIVERSITAS ISU SDGs

## DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengantar: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si.



Penulis:

Arif Wicaksa | Syahroni Alby | Rahmi Yulia | Purwasandi  
Umunnisa Hidayati | Fatmawati | Arya Luthfi Permadi  
Munawir Siahaan | Dhanang Fawaiz Akbar

# **DIVERSITAS ISU SDGs DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pengantar : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si.**

**Arif Wicaksa  
Syahroni Alby  
Rahmi Yulia  
Purwasandi  
Umunnisia Hidayati  
Fatmawati  
Arya Luthfi Permadi  
Munawir Siahaan  
Dhanang Fawaiz Akbar**

# DIVERSITAS ISU SDGs DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

## **Tim Penulis:**

Arif Wicaksa  
Syahroni Alby  
Rahmi Yulia  
Purwasandi  
Umunnisia Hidayati  
Fatmawati  
Arya Luthfi Permadi  
Munawir Siahaan  
Dhanang Fawaiz Akbar

**Editor** : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : ix, 167  
**ISBN** : 978-634-7522-49-8  
**Terbit Pada** : April 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Studi Hubungan Internasional (HI) sejak awal tidak pernah bersifat statis. Ia tumbuh, beradaptasi, dan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan struktur sistem internasional, pergeseran aktor, serta berkembangnya isu-isu global yang semakin kompleks dan saling beririsan. Jika pada masa awal disiplin ini negara dan keamanan tradisional menjadi pusat perhatian utama, maka dewasa ini HI menjelma sebagai bidang kajian yang plural, baik secara ontologis, epistemologis, maupun metodologis.

Buku *Diversitas Isu SDGs dalam Hubungan Internasional* hadir untuk menangkap dinamika tersebut. Karya ini merefleksikan bagaimana studi HI tidak lagi dapat dipahami secara dangkal melalui dikotomi “high politics” dan “low politics”, melainkan sebagai ruang keilmuan yang memayungi beragam isu lintas sektor, lintas level analisis, dan lintas wilayah. Keberagaman isu yang dibahas dalam buku ini menegaskan bahwa HI adalah disiplin yang hidup, responsif terhadap perubahan global sekaligus peka terhadap konteks regional dan lokal.

Relasi antara globalisme dan regionalisme menjadi salah satu lensa penting untuk memahami perkembangan HI kontemporer. Globalisasi telah mendorong intensifikasi interaksi lintas negara, mempercepat arus barang, modal, ide, dan teknologi, serta melahirkan tantangan global yang bersifat transnasional. Namun, di saat yang sama, regionalisme justru menunjukkan ketahanannya sebagai strategi kolektif negara-negara untuk merespons tekanan global tersebut. Kawasan tidak hanya menjadi arena adaptasi, tetapi juga ruang artikulasi kepentingan, solidaritas, dan inovasi kebijakan.

Bab-bab dalam buku ini mencerminkan dialektika globalisme dan regionalisme tersebut. Transformasi studi keamanan internasional, misalnya, menunjukkan pergeseran dari pendekatan negara-sentris menuju pemahaman keamanan yang lebih luas dan inklusif. Keamanan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai perlindungan wilayah dan kedaulatan negara, tetapi juga mencakup perlindungan

individu dan komunitas dari ancaman non-tradisional yang bersifat lintas batas.

Isu kolaborasi ASEAN dalam bidang ekonomi menegaskan pentingnya regionalisme sebagai respons strategis terhadap globalisasi ekonomi. ASEAN tidak hanya menjadi wadah integrasi pasar, tetapi juga ruang negosiasi kepentingan negara-negara anggota dalam menghadapi ketimpangan pembangunan, disrupsi ekonomi global, dan tantangan ekonomi digital. Dalam konteks ini, kawasan menjadi jembatan antara tuntutan global dan kebutuhan domestik.

Pembahasan mengenai isu gender memperkaya perspektif HI dengan pendekatan kritis yang menantang asumsi-asumsi arus utama. Isu ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam sistem internasional tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan politik yang sering kali meminggirkan kelompok tertentu. Dengan memasukkan gender sebagai bagian integral dari analisis HI, buku ini memperluas cakrawala keilmuan sekaligus memperkuat relevansi normatif disiplin ini.

Transisi energi dan ancaman terhadap keamanan manusia semakin menegaskan bahwa tantangan global masa kini bersifat multidimensional. Perubahan iklim, krisis energi, pangan, dan kesehatan tidak mengenal batas negara, namun dampaknya sangat kontekstual di tingkat regional dan lokal. Di sinilah peran kerja sama regional dan diplomasi menjadi krusial, bukan hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan manusia.

Bab mengenai diplomasi dan keamanan menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi terbatas pada negosiasi antarnegara, melainkan melibatkan berbagai aktor dan isu lintas sektor. Sementara itu, ekonomi digital mencerminkan wajah baru globalisasi yang menghadirkan peluang sekaligus kerentanan baru, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan.

Secara keseluruhan, buku ini menawarkan pemahaman bahwa Hubungan Internasional adalah disiplin yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual. Keberagaman isu yang diangkat bukanlah tanda fragmentasi keilmuan, melainkan kekuatan analitis yang memungkinkan kita membaca dunia secara lebih utuh. Buku ini

diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami kompleksitas hubungan internasional di era kontemporer.

Akhir kata, saya menyambut baik kehadiran buku ***Diversitas Isu SDGs dalam Hubungan Internasional*** sebagai kontribusi berharga bagi pengembangan keilmuan HI, khususnya dalam memperkaya diskursus yang berpijak pada realitas global sekaligus sensitif terhadap dinamika kawasan.

Pekanbaru, 1 Februari 2026

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si.  
Penulis


# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 MENDAYUNG ANTARA BANYAK KARANG: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA DENGAN MENJADI ANGGOTA BRICS .....</b>	<b>1</b>
(Arif Wicaksa)	
Pendahuluan .....	2
Peluang Bagi Indonesia Dengan Bergabung Dengan BRICS.....	6
Tantangan dan Ancaman Bagi Indonesia dengan Bergabung Dengan BRICS .....	10
Kesimpulan .....	12
Daftar Pustaka .....	14
Profil Penulis .....	17
<b>BAB 2 IMPLEMENTASI SDGs MELALUI KOLABORASI ASEAN DAN IORA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU DI INDO-PASIFIK .....</b>	<b>18</b>
(Syahroni Alby)	
Pendahuluan .....	19
Ekonomi Biru di Indo-Pasifik.....	23
Kolaborasi ASEAN dan IORA .....	31
Prinsip Kerja Sama IORA.....	33
Kesimpulan .....	34
Daftar Pustaka .....	37
Profil Penulis .....	41
<b>BAB 3 PEREMPUAN DALAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN GLOBAL: AGENDA WPS DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA ..</b>	<b>42</b>
(Rahmi Yulia)	
Pendahuluan .....	43
Evolusi Agenda Women, Peace and Security (WPS) .....	45
Kerangka Teori: Keamanan Feminis dan Agenda WPS .....	47
Perempuan sebagai Aktor Keamanan.....	49

Perempuan dalam Misi Perdamaian: Kepercayaan dan Keamanan Emosional .....	51
Implementasi Regional: Fokus pada Asia Tenggara dan Indonesia .....	52
Tantangan dan Peluang Regional.....	53
Kesimpulan .....	54
Daftar Pustaka.....	55
Profil Penulis.....	57
<b>BAB 4 TRANSFORMASI STUDI KEAMANAN INTERNASIONAL: KERANGKA UMUM, PERUBAHAN SEJARAH, DAN POLA BARU KEAMANAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>58</b>
(Purwasandi)	
Isu Keamanan Internasional sebagai Pendahuluan .....	59
Perkembangan Isu-isu Strategis.....	60
Kerangka Umum Studi Keamanan Internasional .....	63
Perubahan Sejarah Studi Keamanan Internasional.....	66
Pola Baru Keamanan Global di Abad Dua Puluh Satu .....	69
Simpulan .....	72
Daftar Pustaka.....	74
Profil Penulis.....	76
<b>BAB 5 TRANSISI ENERGI DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>77</b>
(Umunnisa Hidayati)	
Pendahuluan .....	78
Konsep Transisi Energi dalam Hubungan Internasional.....	80
<i>Energy Security</i> dan Transisi Energi dalam Hubungan Internasional.....	84
Tata Kelola Global dalam Transisi Energi.....	87
Kesimpulan.....	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	96
<b>BAB 6 PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN MANUSIA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>97</b>
(Fatmawati)	
Pendahuluan .....	98
Reorientasi Studi Keamanan dalam Hubungan Internasional..	99

Lahirnya Konsep Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> ) .....	100
Perdagangan Manusia dalam Hubungan Internasional.....	102
Perdagangan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Manusia .....	105
Kerja sama Internasional dalam Memberantas Perdagangan Manusia .....	107
Kesimpulan.....	111
Daftar Pustaka.....	112
Profil Penulis.....	115
<b>BAB 7 TATA KELOLA PERDAGANGAN DIGITAL INDONESIA DALAM NEGOSIASI <i>E-COMMERCE</i> INTERNASIONAL: ANALISIS STRATEGIS POSISI INDONESIA DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL GLOBAL.....</b>	<b>116</b>
(Arya Luthfi Permadi)	
Pendahuluan .....	117
Transformasi Ekonomi Digital Asia Tenggara: Momentum dan Dinamika Pertumbuhan .....	118
Evolusi Kerangka Kerja Tata Kelola Perdagangan Digital Global dan Pencapaian WTO JSI.....	121
Isu-isu Kontroversial dalam Perdagangan Digital Global .....	123
Posisi Strategis Indonesia dalam Negosiasi WTO JSI .....	124
Pembelajaran dari Pendekatan Negara Asia dalam Diplomasi Digital .....	126
Kebijakan Ekonomi Digital Domestik Indonesia: Proteksi dan Kedaulatan .....	127
Rekomendasi Strategis untuk Indonesia: Menyeimbangkan Integrasi Global dan Kedaulatan Digital .....	129
Kesimpulan.....	131
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis.....	136
<b>BAB 8 STRATEGI <i>HEDGING</i> NEGARA KECIL DI KAWASAN TELUK DALAM MENGHADAPI RIVALITAS SAUDI-IRAN.....</b>	<b>137</b>
(Munawir Siahaan)	
Pendahuluan .....	138
Konsep <i>Hedging</i> dalam Hubungan Internasional.....	139
Relevansi dan Risiko <i>Hedging</i> bagi Negara Kecil.....	143

Strategi Hedging Negara-Negara Kecil di Teluk.....	144
Kesimpulan.....	148
Daftar Pustaka.....	149
Profil Penulis.....	153
<b>BAB 9 PENGARUH AI DAN DISRUPSI TEKNOLOGI DALAM</b>	
<b>HUBUNGAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>154</b>
(Dhanang Fawaiz Akbar)	
Pendahuluan.....	155
Neorealisme dalam Konteks AI dan Disrupsi Teknologi.....	157
Kompetisi Global dan <i>AI Arms Race</i> .....	158
Redefini Kekuasaan Global.....	160
Kesimpulan.....	162
Daftar Pustaka.....	164
Profil Penulis.....	167



**BAB 1**  
**MENDAYUNG ANTARA**  
**BANYAK KARANG:**  
**PELUANG DAN TANTANGAN**  
**BAGI INDONESIA DENGAN**  
**MENJADI ANGGOTA BRICS**

---

Arif Wicaksa, M.A.  
Universitas Riau



## Pendahuluan

BRICS, yang merupakan singkatan dari *Brazil, Russia, India, China, and South Africa* merupakan blok negara-negara yang menjadi signifikan baik secara ekonomi maupun politik pada abad ke-21 dalam tatanan politik dunia. Pada awalnya dikenal dengan nama BRIC, dan istilah ini dikenalkan oleh seorang ekonom Jim O'Neill pada tahun 2001 (Cooper, 2016). Istilah BRIC pada awalnya digunakan untuk menggambarkan negara yang punya potensi kekuatan ekonomi baru yang diperkirakan punya potensi untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia secara signifikan.

Secara formal, blok ini terbentuk pada tahun 2006 dengan pertemuan-pertemuan formalnya pada tahun 2009. Afrika Selatan secara resmi bergabung pada tahun 2006 yang pada akhirnya mengubah BRIC menjadi BRICS.

Seiring berkembangnya waktu, BRICS berhasil memposisikan dirinya sebagai institusi alternatif dari institusi yang didominasi barat seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia. Pada tahun 2023, BRICS makin memperluas jaringan keanggotaannya dengan mengundang negara semisal Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia, menjadikan BRICS sebagai aktor perubahan tata kelola dunia yang diperhitungkan (Nach dan Ncwadi, 2023)

Meskipun negara-negara BRICS berasal dari latar belakang politik dan ekonomi yang berbeda-beda, mereka memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan terkait pergeseran tatanan tata kelola dunia berbasis dominasi negara barat, dengan menekankan pada kerja sama selatan-selatan.

Secara umum BRICS memiliki beberapa tujuan yang menjadi fitur unik dari eksistensinya. Diantaranya seperti mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan barat dengan mendirikan NDB (*National Development Bank*) dan CRA (*Contingent Reserve Arrangement*). Dengan pendirian institusi ini pada akhirnya diharapkan berdampak pada penguatan relasi perdagangan dan ekonomi dari negara-negara BRICS. Dengan peningkatan intensitas relasi perdagangan dan ekonomi negara BRICS, juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan pada penggunaan dolar Amerika Serikat

sebagai mata uang perdagangan. Dengan mengurangi ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, khususnya bagi negara anggota BRICS, maka pada saat yang sama penggunaan mata uang lokal bisa makin ditingkatkan (Nach dan Ncwadi, 2023).

Dengan kebijakan dan keuntungan ekonomi yang diharapkan dari terbentuknya BRICS, maka konsekuensinya terhadap ekonomi global tentu cukup signifikan karena memang negara-negara anggota BRICS merupakan representasi dari kekuatan ekonomi besar di dunia. BRICS merepresentasikan 31,5% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dari total PDB global pada tahun 2023 yang bahkan mengalahkan PDB dari negara G7 yang bernilai 30% (Business Standard, 2023).

Selain kebijakan ekonomi hingga PDB BRICS yang menjadi motor pendorong kontribusi signifikan BRICS dalam ekonomi global, faktor jumlah penduduk juga memerankan faktor penting dalam perdagangan dunia. Dengan populasi penduduk lebih dari 3,2 miliar jiwa, BRICS jelas menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sangat besar dan potensial (European Parliament, 2024).

Dengan segala potensi kekuatan ekonomi yang digambarkan di atas, maka BRICS juga diperkirakan kuat akan memiliki pengaruh dalam aspek tata kelola politik dunia. Misalnya, negara-negara BRICS secara konsisten diketahui terus mendorong agenda “de-dolarisasi” yakni meninggalkan penggunaan mata uang dollar Amerika Serikat. Inisiasi seperti *BRICS Common Payment System* dan kemungkinan pembentukan mata uang BRICS menjadi tantangan besar bagi dollar Amerika Serikat sebagai mata uang dominan dalam perdagangan dunia (Saaida, 2024). Lebih jauh lagi, negara BRICS memosisikan diri sebagai pemimpin dari negara-negara selatan global (*Global South*).

Dengan segala keunikan dan tawaran yang diberikan oleh BRICS, maka tidak mengherankan bahwa BRICS memiliki sifat ekspansif dalam keanggotaannya. Artinya, pada masa depan sangat besar kemungkinan akan terus ada negara-negara yang bergabung menjadi anggota BRICS, misalnya Indonesia yang secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS pada 7 Januari 2025 setelah sebelumnya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada 24 Oktober 2024 lalu (Kemlu, 2025).

Kebijakan mendekat ke BRICS dan menjadi anggota formalnya merupakan kebijakan luar negeri pertama yang dilakukan oleh Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa posisi BRICS bagi Indonesia sangat penting dan signifikan bagi kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia.

Negara seperti Indonesia melihat peluang dengan keberadaan BRICS untuk mendukung tercapainya kepentingan nasionalnya sehingga memutuskan untuk bergabung dengan institusi internasional tersebut. Meskipun demikian, bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak serta-merta menjadikan harapan dari Indonesia menjadi terwujud tanpa adanya tantangan dan hambatan dalam menjalani proses sebagai anggota BRICS.

Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS merupakan kombinasi dari faktor yang kompleks. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, bahwa bagi Indonesia, dunia saat ini sedang dihadapkan pada kondisi *polycrisis* yang memiliki dampak multidimensional. Indonesia percaya bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami perubahan besar. Persoalan krisis kemanusiaan, dan terabaikannya hukum internasional serta melemahnya multilateralisme yang diperparah dengan kebijakan negara-negara dominan (maksudnya negara barat) yang tetap berusaha mempertahankan dominasi mereka dalam status quo menjadi faktor-faktor yang mengarahkan pada skenario terburuk yaitu perang dunia (Kemlu, 2025).

Berdasarkan posisi dan persepsi Indonesia pada politik global, dapat dipahami bahwa Indonesia sedang berusaha menjaga jarak dari negara dominan barat. Hal ini juga bisa dipahami berdasarkan perbedaan sikap kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam pentas dunia. Misalnya sikap Indonesia yang menentang perbuatan kekejaman Israel terhadap Palestina yang mengalami eskalasi kekerasan drastis sehingga menjadi perhatian dunia sejak Oktober tahun 2023 hingga tahun 2025 ini. Lebih dalam lagi, Indonesia merupakan negara yang tidak mengakui eksistensi negara Israel namun mendorong solusi dua negara (*Two State Solution*) dalam penyelesaian masalah Israel-Palestina.

Sikap Indonesia terhadap masalah Israel-Palestina merupakan sikap yang tidak sejalan dengan pandangan negara-negara dominan barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal ini menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk menguatkan hubungan lebih jauh dengan negara barat.

Pada aspek domestik sendiri, pemerintahan Prabowo Subianto menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% pada masa pemerintahannya yang merupakan peningkatan target dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pertumbuhan sekitar 5,2% (Setpres, 2025). Target yang ingin dicapai oleh Prabowo merupakan target peningkatan ambisius mengingat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan, dan pada sisi lain IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,7% saja (Tempo, 2024)

Target pertumbuhan ekonomi yang demikian ambisius oleh Prabowo dalam pemerintahannya harus berbenturan dengan kebijakan ekonomi negara-negara barat yang bersifat proteksionis yang menciptakan hambatan bagi komoditas ekonomi Indonesia untuk mengakses pasar-pasar negara barat. Pada sisi lain, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekonomi ekstraktif yang menekankan pada eksploitasi kekayaan sektor sumber daya alam yang dianggap tidak sesuai standar keberlanjutan oleh negara-negara barat melalui kebijakannya.

Persoalan hak asasi manusia dalam artian permasalahan pelanggaran yang pernah terjadi pada masa lalu sejarah Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hingga persoalan standar kelayakan upah buruh juga menjadi batu sandungan hubungan Indonesia dengan negara-negara barat.

Kombinasi dari keadaan tata kelola global yang didominasi negara barat yang tidak suportif bagi kebijakan Indonesia, ditambah tuntutan domestik bagi Indonesia pada akhirnya membuahakan kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS.

Lebih jauh daripada keadaan tata kelola global dan tuntutan domestik, lantas bagaimana peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia jika dibandingkan dengan tantangan

## Daftar Pustaka

- Africa Policy Research Institute. (2024). BRICS and the human rights conundrum. <https://afripoli.org/brics-and-the-human-rights-conundrum>
- Bisnis Indonesia. (2025, Maret 14). Ambisi baru Prabowo bangun kilang minyak raksasa demi swasembada energi. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250314/44/1861361/ambisi-baru-prabowo-bangun-kilang-minyak-raksasa-demi-swasembada-energi>
- Boston Consulting Group. (2024). An evolving BRICS and the shifting world order. <https://www.bcg.com/publications/2024/brics-enlargement-and-shifting-world-order>
- BRICS surpass G7 GDP, India, China major economies with fast growth. (2024). Business Standard. [https://www.business-standard.com/economy/news/brics-surpass-g7-gdp-india-china-major-economies-with-fast-growth-123042000484\\_1.html](https://www.business-standard.com/economy/news/brics-surpass-g7-gdp-india-china-major-economies-with-fast-growth-123042000484_1.html)
- Briefing of European Parliament. (2024, Maret). Expansion of BRICS: A quest for greater influence? [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760368/EPRS\\_BRI\(2024\)760368\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760368/EPRS_BRI(2024)760368_EN.pdf)
- Cooper, A. F. (2016). The BRICS: A very short introduction. Oxford University Press.
- CSIS. (2025). Indonesia joins BRICS. <https://www.csis.org/blogs/latest-southeast-asia/latest-southeast-asia-indonesia-joins-brics>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2024, Maret). Buletin perdagangan internasional kawasan ASPASAF (Asia Pasifik dan Afrika). [https://kemlu.go.id/files/repositori/56623/172775397466fb6ef6dad5b\\_Buletin\\_2024.pdf](https://kemlu.go.id/files/repositori/56623/172775397466fb6ef6dad5b_Buletin_2024.pdf)
- Kemlu RI. (2025). Transkrip pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2025. <https://kemlu.go.id/publikasi/pidato/pidato-menteri/transkrip->

[pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2025?type=publication](#)

Lili Yan Ing, D. Penelo, & R. Anandhika (Eds.). (2024). Non-tariff measures: Australia, China, India, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Lowy Institute. (2025). Indonesia must reclaim its ASEAN leadership. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/indonesia-must-reclaim-its-asean-leadership>

Melinda, M. (2025). Indonesia's probable foreign policy shift from the West under a Prabowo administration. ISEAS Perspectives. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2025-12-indonesias-probable-foreign-policy-shift-from-the-west-under-a-prabowo-administration-by-melinda-martinus/>

Nach, M., & Ncwadi, R. (2024). BRICS economic integration: Prospects and challenges. *South African Journal of International Affairs*, 31(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/10220461.2024.2380676>

Reuters. (2024). Indonesia sees FDI worth \$47 billion in 2023 – Investment Ministry. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-sees-fdi-worth-47-bln-2023-investment-ministry-2024-01-24/>

Saaida, M. (2024). BRICS Plus: De-dollarization and global power shifts in new economic landscape. In M. Sheresheva & Y. D. Lissovlik (Eds.), *Changing the global monetary and financial architecture: The role of BRICS-Plus* (*BRICS Journal of Economics*, 5(1), 13-33). <https://doi.org/10.3897/brics-econ.5.e117828>

Saji, T. G. (2017). Can BRICS form a currency union? An analysis under Markov regime-switching framework. *Global Business Review*, 20(1), 151–165. <https://doi.org/10.1177/0972150917721835> (Original work published 2019)

Santoso, R. B., Dermawan, W., & Moenardy, D. F. (2024). Indonesia's

rational choice in the nickel ore export ban policy. Cogent Social Sciences, 10(1).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2400222>

Sekretariat Presiden RI. (2025). Presiden Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 8 persen. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-capai-8-persen/>

South China Morning Post. (2025). Why not? Indonesia mulls cheap Russian oil imports post-BRICS entry despite risks. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3294714/why-not-indonesia-mulls-cheap-russian-oil-imports-post-brics-entry-despite-risks>

Tempo. (2025). Economist: Almost impossible for Indonesia's economic growth to reach 8 percent. <https://en.tempo.co/read/1935257/economist-almost-impossible-for-indonesias-economic-growth-to-reach-8-percent>


The Diplomat. (2019, Juli). Where is Indonesia on China's Belt and Road Initiative? <https://thediplomat.com/2019/07/where-is-indonesia-on-chinas-belt-and-road-initiative/>

## PROFIL PENULIS



### **Arif Wicaksa, M.A.**

Penulis merupakan akademisi di bidang Studi Hubungan Internasional yang menempuh pendidikan sarjana (S1) Hubungan Internasional di Universitas Riau dan melanjutkan studi magister (S2) Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan akademik pada kajian ekonomi politik internasional, isu-isu humanitarianisme, serta dinamika kawasan Asia Tenggara. Ketiga bidang tersebut menjadi fokus utama dalam aktivitas riset dan pengajarannya. Saat ini, Arif Wicaksa berkiprah sebagai dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau, di mana ia aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan pembelajaran, ia mampu berbagai mata kuliah, antara lain Studi Kawasan Asia Tenggara, Kerja Sama Ekonomi ASEAN, serta Pemikiran Politik. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan serta kontribusi keilmuan di bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks regional dan global.



**BAB 2**

**IMPLEMENTASI SDGs**

**MELALUI KOLABORASI**

**ASEAN DAN IORA DALAM**

**PEMBANGUNAN**

**EKONOMI BIRU DI INDO-**

**PASIFIK**

---

**Syahroni Alby, S.IP., M.Si.**  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Tidak meratanya kondisi kemajuan pembangunan di dunia dapat menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal memperlebar ketimpangan yang kemudian mengakibatkan munculnya polarisasi politik dalam skala global. Hal ini kemudian menyebabkan beragam persoalan yang untuk mengatasinya membutuhkan tindakan bersama (UNDP Indonesia, 2024) Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh PBB untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan kehidupan yang layak dan aman bagi setiap individu pada tahun 2030 adalah program *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan visi yang ditujukan pada seluruh wilayah di dunia. Program ini juga disebut sebagai “*Global Goals*”, melalui program ini diharapkan tidak lagi ditemukan permasalahan kemiskinan, kelaparan, AIDS, maupun diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan.

Sasaran-sasaran pembangunan SDGs berlaku universal, maksudnya adalah bahwa tujuan SDGs diberlakukan untuk seluruh negara, baik negara yang tertinggal, berkembang maupun negara maju. SDGs mempunyai 17 tujuan yang indikator capaiannya berjumlah 169. Tujuan SDGs merupakan tujuan yang terintegrasi, di mana aktivitas di satu bidang dapat memberikan pengaruh pada bidang lainnya. Pembangunan yang dilakukan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dilakukan secara seimbang agar dapat berkelanjutan sehingga kehidupan dunia dapat bertransformasi menjadi suatu tempat yang dapat dihuni dengan lebih baik. Deklarasi SDGs ini dilakukan pada September 2015 pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Penerapan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilakukan secara instan, namun diawali dengan terdapatnya tujuan yang sama dari keseluruhan negara anggota ASEAN. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan yang sejalan, sepuluh negara anggota ASEAN telah menandatangani *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep tersebut berlandaskan pada kerangka acuan internasional yang dijadikan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen yang terdapat pada isi Piagam ASEAN 2015 yaitu memastikan dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan saat ini dan masa depan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan mata pencaharian masyarakat adalah hal yang diprioritaskan dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN (Praditya Fathir Rizqi & Aldi Muhammad Alizar, 2023).

Salah satu konsep yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Blue Economy* atau ekonomi biru. Konsep ini muncul sejak awal tahun 2000an yang pada saat itu perhatian global tertuju pada pembangunan berkelanjutan. Gunter Pauli merupakan orang pertama yang mencetuskan istilah ekonomi biru. Ia merupakan seorang pengusaha dan pendukung keberlanjutan yang berasal dari Belgia. Ekonomi biru ini pertama kali diperkenalkan melalui bukunya yang berjudul "*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs*" (Retno, 2024).

Dalam bukunya tersebut ia menjelaskan Ekonomi Biru merupakan gabungan upaya yang berdampak pada penciptaan kesadaran global yang berakar pada upaya mencari solusi praktis berdasarkan sistem pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik, ASEAN sangat berkepentingan terhadap kawasan regional yang aman, damai, dan makmur (Firman, 2024). Faktor lain yang membuat Kawasan Indo-Pasifik penting bagi ASEAN adalah bahwa negara-negara anggota berada di Asia Tenggara berada di titik transisi antara Samudera Hindia dan Pasifik. Negara-negara yang mendukung gagasan Indo-Pasifik juga memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan (Alby et al., 2021).

Untuk mewujudkan Kawasan regional yang aman, damai dan makmur maka ASEAN memperkuat kerjasama regional dengan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dan *Pacific Island Forum* (PIF) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Hal ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis. Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik, sambil menghindari rivalitas kekuatan besar dan konflik

yang dapat merusak kawasan. MoU ini mencakup berbagai area prioritas seperti kerja sama maritim, konektivitas, inklusivitas, pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan manajemen bencana (Dikarma, 2024).

Selain dikenal sebagai ekonomi biru, nama lain yang juga merujuk pada upaya memanfaatkan berbagai sumber daya laut secara berkelanjutan adalah ekonomi laut atau ekonomi maritim. Pemanfaatan tersebut di antaranya digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki kehidupan masyarakat hingga bertujuan untuk terwujudnya ekosistem laut yang sehat. Sektor-sektor yang diantaranya terdapat dalam cakupan ekonomi biru adalah sektor pelayaran, perikanan, bioteknologi kelautan, energi, akuakultur dan pariwisata. Saat ini, banyak orang, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, memperhatikan potensi ekonomi biru untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Beragamnya potensi ekonomi biru tidak menjadikannya terbebas dari sejumlah tantangan modern yang mengancam keberlanjutan dan potensi manfaatnya. Penangkapan ikan berlebihan, polusi, perusakan habitat, dan perubahan iklim membahayakan kesehatan lautan dan sumber dayanya. Mereka mempengaruhi lingkungan dan memiliki dampak ekonomi dan sosial, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati, mata pencaharian, dan warisan budaya (Retno, 2024).

Ekonomi biru menjadi topik strategis yang krusial, mengingat ekosistem laut yang terjaga kesehatannya memiliki potensi besar dalam menyediakan peluang kerja, sumber pangan, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, berperan dalam regulasi iklim, serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Namun, sekitar 20% wilayah laut global saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman lingkungan. Faktor-faktor utama penyebab kerentanan ini mencakup pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, serta aktivitas deforestasi. Akibatnya, ekosistem laut dihadapkan pada tiga tekanan utama, yaitu peningkatan suhu yang ekstrem, penurunan kadar oksigen terlarut, dan pengasaman laut, yang intensitasnya semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir (CNN Indonesia, 2024). Kondisi laut

## Daftar Pustaka

- Adnan, A. D. I., & Hasana, S. (2024). Implementasi Blue Economy Di Indonesia Dengan Memanfaatkan Teknologi Big Data. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 134–140. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31735>.
- Afp. (2024). PBB: Populasi Dunia akan Capai 10,3 Miliar pada 2080-an. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-populasi-dunia-akan-capai-10-3-miliar-pada-2080-an/7696742.html>
- Albi, S., Oktyari Retnaningsih, U., & Eka Nizmi, Y. (2021). Strategi Asean Menghadapi Persaingan Kekuatan Amerika Serikat Dan China Di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal Publicuho*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16116>
- Alby, S., Retnaningsih, U. O., & Nizmi, Y. E. (2021). Strategi Asean Menghadapi Persaingan Kekuatan Amerika Serikat Dan China Di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal Publicuho*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/16116/pdf>.
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85.
- Archer, C. (2014). Teori Organisasi Menurut Para Ahli. In *IDtesis* (p. 36). <https://idtesis.com/teori-organisasi-menurut-para-ahli/>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Peran Badan pemeriksa Keuangan RI Dalam SDGs. *Badan Pemeriksa Keuangan RI*. [https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach\\_page\\_1652255145.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf)
- Binus. (2023). Serba-serbi Blue Economy di Indonesia - Graduate Program. *Graduate Program*. <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/serba-serbi-blue-economy-di-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2024). *CNN Indonesia "Laut Makin Terancam 3 Hal Ngeri Gara-gara Krisis Iklim*.

- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240607131913-641-1107106/laut-makin-terancam-3-hal-ngerigara-gara-krisis-iklim>.
- Dikarma, K. (2024). *Perkuat Relasi di Indo-Pasifik, ASEAN Teken MoU dengan IORA dan PIF*. <https://internasional.republika.co.id/berita/s0h2q6451/perkuat-relasi-di-indopasifik-asean-teken-mou-dengan-iora-dan-pif>.
- Firman, H. (2024). *ASEAN Dorong Kemajuan dan Kemakmuran Indo-Pasifik*.
- Hartana, P. D. (2021). Eksistensi Organisasi Internasional Melalui Kolaborasi Guna Mempererat Hubungan Antar Negara. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 110–119. <file:///D:/My Documents/Download/451-Article Text-1205-3-10-20230620.pdf>
- Humas Instiki. (2024). *Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>
- Indonesia, G. (2024). *Hari Laut Sedunia : Peran dan Ancaman yang Dihadapi Laut*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/45023/hari-laut-sedunia-peran-dan-ancaman-yang-dihadapi-laut>
- IORA. (2024). *IORA Cross-cutting Issues*. <https://www.iora.int/blue-economy>
- Myanmar, K. B. R. I. Y. (2024). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/yanon/id/news/24713/esensi-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aoip>.
- Narwal, S., Kaur, M., Yadav, D. S., & Bast, F. (2024). Sustainable blue economy: Opportunities and challenges. *Journal of Biosciences*, 49(1). <https://doi.org/10.1007/s12038-023-00375-x>
- Nasution, M. (2022). The Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review. *Jurnal Budget*, 7(ue 2), 340–342.

- Negara, S. (2024). ASEAN Pererat Kerja Sama dengan IORA dan PIF". *Diakses Pada 14 Agustus*.
- OBSERVER. (2023). Space-Based Solutions for the Blue Economy. In <https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-space-based-solutions-blue-economy>
- Ocean warming triggers Indo-Pacific heatwaves. (2024). *Ocean warming triggers Indo-Pacific*. <https://www.preventionweb.net/news/ocean-warming-triggers-indo-pacific-heatwaves>
- Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). Indian Ocean Rim Association. *Diakses Pada*.
- Praditya Fathir Rizqi, & Aldi Muhammad Alizar. (2023). Perjalanan SDGs dan Perkembangan pada ASEAN. *Mirekel - PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan*. <https://mirekel.id/perjalanan-sdgs-dan-perkembangan-pada-asean>
- Pragya, P. (2024). IORA's Indo-Pacific Outlook and its Significant Role in the Region. *Di Akses Pada*.
- Pristiandaru, D. L. (2023). Mengenal Tujuan 14 SDGs: Ekosistem Lautan. *KOMPAS.Com*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/22/080000486/mengenal-tujuan-14-sdgs--ekosistem-lautan#>
- Retno, S. (2024). Ekonomi Biru. *Diakses Pada 29 Januari 2024*.
- RRI. (2024, August). *Manfaat laut bagi kehidupan*.
- Sinderpal Singh. (2023). The Blue Economy in the Indo-Pacific Prospects and Challenges in the Indian Ocean Region. *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 5. [chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://library.files.de/pdf-files/bueros/asia/19232.pdf](https://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://library.files.de/pdf-files/bueros/asia/19232.pdf)
- The ASEAN Secretaria. (2023). Asean Maritime Outlook. In A. 2023 Jakarta: ASEAN Secretariat (Ed.), *first* (1st ed., p. 77). Jakarta: ASEAN Secretariat. [chrome-](https://asean.org)

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf

UNDP Indonesia. (2024). Hasil temuan Program Pembangunan PBB: Negara-negara maju capai rekor pembangunan manusia, namun setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran. In *UNDP Indonesia* (p. 1). <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/hasil-temuan-program-pembangunan-pbb-negara-negara-maju-capai-rekor-pembangunan-manusia-namun-setengah-dari-negara-negara>


UNEP. (2024). *Sustainable Blue Economy | Commonwealth*. <https://thecommonwealth.org/bluecharter/sustainable-blue-economy>

## PROFIL PENULIS



### **Syahroni Alby, S.IP., M.Si.**

Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang Hubungan Internasional, dengan minat pada isu-isu global kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional dan pembangunan berkelanjutan. Ia menyelesaikan gelar Sarjana dan Magister Hubungan Internasional di Universitas Riau, Indonesia. Saat ini, ia merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Riau, dan juga bekerja sebagai Tutor Online di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik (FHISIP), Universitas Terbuka. Minat penelitiannya meliputi pembangunan internasional, urusan regional Indo-Pasifik, ekonomi politik, pariwisata, dan studi pesisir. Sebagai pendidik dan penulis, ia berkomitmen untuk menghasilkan karya ilmiah yang menjembatani wawasan akademis dengan relevansi praktis.



**BAB 3**

**PEREMPUAN DALAM  
PERDAMAIAN DAN  
KEAMANAN GLOBAL:  
AGENDA WPS DAN  
IMPLIKASINYA BAGI  
INDONESIA**

---

**Rahmi Yulia, S.IP., M.Han.**  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Isu perempuan, perdamaian, dan keamanan (Women, Peace and Security/WPS) telah menjadi salah satu diskursus utama dalam studi hubungan internasional kontemporer. Perhatian terhadap dimensi gender dalam keamanan internasional muncul seiring dengan pergeseran paradigma dari keamanan negara (*state security*) menuju keamanan manusia (*human security*), yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan individu sebagai aktor kunci dalam perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (Hendricks, 2020).

Sejak diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000, perhatian global terhadap peran perempuan dalam mencegah konflik, menjaga perdamaian, serta membangun kembali masyarakat pasca-konflik meningkat secara signifikan. Resolusi ini menjadi tonggak penting dalam mengakui bahwa pengalaman dan kontribusi perempuan dalam situasi konflik seringkali diabaikan, padahal sangat penting untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan (UNDP, 2019).

Pendekatan tradisional terhadap keamanan dan konflik cenderung menempatkan perempuan sebagai korban pasif, bukan sebagai aktor aktif dalam proses perdamaian. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian berkontribusi terhadap keberlanjutan perjanjian damai, meningkatkan legitimasi proses, serta memperluas agenda pembangunan pasca-konflik (Johnson-Freese, 2023; Priebe & Fitriani, 2023).

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap agenda WPS tercermin dalam berbagai inisiatif kebijakan dan partisipasi aktif dalam operasi perdamaian internasional. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia, dan secara aktif mendorong peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hingga tahun 2023, sekitar 6,5 persen dari total pasukan Indonesia di bawah bendera PBB adalah perempuan, angka yang menunjukkan tren positif, meskipun masih di bawah target minimal 15 persen yang direkomendasikan PBB (UN Women Indonesia, 2024).

Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional WPS (NAP-WPS) yang tidak hanya menekankan partisipasi perempuan dalam konteks konflik bersenjata, tetapi juga mencakup isu-isu kontemporer seperti ekstremisme kekerasan berbasis gender, disinformasi digital, dan perubahan iklim sebagai faktor ketidakamanan baru (UN Women Indonesia, 2024). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang proaktif dalam mendorong pendekatan keamanan yang inklusif dan responsif terhadap pengalaman perempuan.

Dalam kerangka itulah bab ini disusun untuk mengkaji secara kritis perkembangan agenda *Women, Peace and Security* (WPS), dengan fokus pada peran perempuan sebagai agen keamanan, tantangan struktural dalam implementasi agenda WPS, serta dinamika lokal dan regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Bab ini akan menawarkan analisis interdisipliner yang mencakup aspek normatif, institusional, dan praktis, guna memperkaya wacana akademik dan kebijakan tentang keamanan berperspektif gender.

Lebih jauh, bab ini menggarisbawahi bahwa mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan bukan hanya merupakan tuntutan keadilan sosial, tetapi juga strategi efektif dalam menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh para pakar keamanan internasional, “tanpa lensa gender, kita tidak bisa memahami akar kekerasan, bentuk ancaman baru seperti ekstremisme berbasis gender, atau kerentanan perempuan di tengah krisis iklim dan konflik sipil” (Priebe, 2023)

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara sistematis berbagai aspek dari agenda WPS, mulai dari evolusi normatifnya, kontribusi perempuan dalam sektor keamanan, hingga tantangan dan peluang dalam konteks nasional dan regional. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keamanan internasional masa kini perlu didekati melalui kerangka yang lebih inklusif dan transformatif.

## Evolusi Agenda Women, Peace and Security (WPS)

### 1. Apa itu Agenda WPS?

*Agenda Women, Peace and Security* (WPS) adalah sebuah kerangka kerja normatif dan kebijakan internasional yang ditujukan untuk memastikan bahwa perempuan dilibatkan secara aktif, bermakna, dan setara dalam seluruh aspek proses perdamaian dan keamanan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Agenda ini lahir dari kenyataan bahwa konflik bersenjata berdampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, serta bahwa perempuan seringkali dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan pascakonflik, meskipun mereka memiliki peran signifikan dalam membangun kembali masyarakat (UNDP, 2019).

Inisiatif ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2000, ketika Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 secara bulat. Resolusi ini merupakan hasil perjuangan panjang organisasi perempuan global, termasuk dari negara-negara berkembang, untuk mendorong pengakuan terhadap pengalaman perempuan dalam konflik dan menuntut hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian. Resolusi ini menyerukan agar negara anggota:

- a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan,
- b. Melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dan berbasis gender,
- c. Mengintegrasikan perspektif gender dalam misi perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik,
- d. Dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan khusus perempuan dalam pemulihan pascaperang (United Nations, 2015).

Setelah Resolusi 1325, sejumlah resolusi tambahan dikeluarkan untuk memperkuat dan memperluas agenda ini, termasuk Resolusi 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), dan 2122 (2013). Resolusi 1820, misalnya, untuk pertama kalinya secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai taktik perang, dan bahwa hal tersebut dapat

peace and security agenda. In *Global study on the implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*

UNDP & UN Women. (2019). *Parliament as partners supporting the women, peace and security agenda: A global handbook*. United Nations Development Programme and UN Women.

UN Women Indonesia. (2024). *Women, peace and security in Indonesia: Progress and outlook*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.


Willett, S. (2020). Militarism and the women, peace and security agenda: The role of militaries in advancing women's rights. In S. E. Davies & J. True (Eds.), *The Oxford handbook of women, peace and security* (pp. 132–145). Oxford University Press.

## PROFIL PENULIS



### **Rahmi Yulia, S.IP., M.Han.**

Rahmi Yulia is a lecturer at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau. She teaches courses on gender and global politics, with a strong commitment to integrating critical gender perspectives into the study of International Relations. Her academic background includes a Master's degree in Defense Studies (M.Han.) from Universitas Pertahanan Indonesia. Her research interests lie at the intersection of gender, military, and women's security within the broader framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). Rahmi actively contributes to scholarly discussions on how gender dynamics influence security policies, peacebuilding efforts, and state development agendas, particularly in the Asian context. Email: rahmiyulia@lecturer.unri.ac.id



**BAB 4**  
**TRANSFORMASI STUDI**  
**KEAMANAN INTERNASIONAL:**  
**KERANGKA UMUM,**  
**PERUBAHAN SEJARAH, DAN**  
**POLA BARU KEAMANAN**  
**INTERNASIONAL**

---

Purwasandi  
Universitas Riau



## **Isu Keamanan Internasional sebagai Pendahuluan**

Keamanan dalam kajian hubungan internasional merupakan isu yang mengalami perkembangan dari berbagai perdebatan, mulai dari keamanan bersifat tradisional hingga non-tradisional. Teks keamanan dibentuk secara signifikan melalui konteks historisnya, sehingga melahirkan kritikan-kritikan terhadap konsep keamanan yang berfokus pada negara sebagai aktor utamanya. Kemunculan aspek lain seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia didorong oleh berbagai faktor yang dapat berkembang melalui aktor non-negara. Kajian keamanan melalui perkembangannya semakin multidimensional dan relevan untuk menjawab tantangan isu keamanan kontemporer pada tingkat internasional maupun nasional.

Paradigma keamanan konvensional berubah seiring munculnya ancaman keamanan baru yang muncul setelah berakhirnya perang dingin. Ancaman-ancaman tersebut meliputi konflik nasional, migrasi internasional, dan kejahatan transnasional. Persoalan-persoalan keamanan tradisional yang berfokus pada kekuatan militer dan stabilitas negara mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam menghadapi ancaman kontemporer. Strategi komprehensif untuk menghadapi ancaman global yang kompleks sangat diperlukan melalui pendekatan keamanan yang sebelumnya hanya bergantung kepada kekuatan negara tidak lagi dianggap sebagai solusi utama dalam menghadapi ancaman. Selain itu, teks keamanan non-tradisional muncul sebagai penantang dan alternatif dengan anggapan bahwa lingkup keamanan bukan hanya negara dan militer saja, namun mencakup proses melibatkan individu dan kelompok sebagai aktor selain negara.

Pandangan dan pendapat tentang keamanan mulai bermunculan dari berbagai perspektif. Menurut *critical security studies*, misalnya, keamanan berorientasi pada ancaman bukan hanya masalah negara, akan tetapi harus dipahami, dikonstruksi, dan siapa yang mendapat keuntungan dan kerugian dari keamanan tertentu. Pandangan lain dari perspektif konstruktivisme memandang keamanan berkaitan dengan persepsi yang berkaitan dengan emosi yang menggerakkan dan dapat dieksploitasi melalui sekuritisasi. Sekuritisasi, yang memanfaatkan emosi melalui kekuatan estetika, dapat menggiring

kesadaran target pada tingkat domestik, internasional, dan global tentang keberadaan keamanan yang diinginkan dan tidak diperhatikan oleh kajian keamanan konvensional (Bainus, Rahman, & Junita, 2017).

Studi keamanan internasional berkembang dan mengadopsi kerangka konseptual yang lebih luas, memperhitungkan perubahan historis, dan identifikasi pola baru dalam keamanan global. Kajian keamanan berkembang dan mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan dengan metode lama yang berpusat pada militer dan negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan menunjukkan bagaimana masalah strategis berkembang, kerangka umum yang mendasarinya, perubahan yang terjadi sepanjang sejarah yang memengaruhi perspektif keamanan, dan pendekatan baru yang muncul untuk menghadapi tantangan keamanan di era kontemporer.

### **Perkembangan Isu-isu Strategis**

Pada awal 1920 dan 1930, isu-isu strategis berkembang pada pemanfaatan teknologi dan penguasaan ilmu alam (*natural science*) bagi ketertarikan suatu negara (Chatherine, 2016). Komunitas suatu negara dibedakan berdasarkan apa yang dilakukannya dan keberhasilan pada pengambilan kebijakan yang dibuat oleh setiap negara tersebut. Isu nuklir menjadi bagian yang digunakan untuk menjaga sebuah negara, hal ini membuat pemerintah suatu negara menggunakan setiap kebijakannya untuk sesuatu yang mereka inginkan.

Sagan Scott (2017) menjelaskan bahwa ada tiga alasan atau cara untuk menjelaskan fenomena nuklir. Pertama, *the security model*, model keamanan berfokus pada upaya negara untuk melindungi negara dari ancaman dari luar. Pada dasarnya, pemikiran realis menyatakan bahwa setiap negara harus memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya sendiri. Hal ini jelas disebabkan oleh ancaman daya rusak nuklir, yang mendorong setiap negara untuk memperkuat kekuatan militernya untuk mengimbangi negara lain yang mengembangkan nuklir. Dengan menggunakan nuklir, kepentingan negara dapat dimaksimalkan. Kedua, *the domestic politic model*, pemanfaatan nuklir digunakan sebagai alat politik untuk

mempengaruhi kelompok elit dalam menuntun arah kebijakan. Sering kali hal ini dijadikan sebagai pemaksaan kepentingan suatu kelompok ketika terjadi benturan politik dalam negeri. Ketiga, *The norms model*, penggunaan nuklir dianggap sebagai tanda modernitas dan keunggulan suatu negara di mata internasional. Kekuatan nuklir suatu negara dapat membentuk identitas dan simbolisasinya. Dalam kasus ini, norma yang berlaku menentukan jalan kebijakan, bukan elit politik.

Pada pengambilan kebijakan, ada 4 prinsip utama yang berpengaruh terhadap isu-isu strategis, yaitu (1) peraturan tertulis yang berkaitan dengan keamanan (*security*) tidak hanya dalam lingkup militer saja, akan tetapi juga ada kaitannya dengan keterlibatan warga negara; (2) pengetahuan yang terbentuk oleh kehidupan sosial atau hukum kebiasaan yang diterapkan dalam melawan ancaman dari luar; (3) pengembangan pemikiran kritis dan fokus perhatian pada hal yang penting bukan yang mendesak untuk bertahan; dan (4) penunjukan hasil kebijakan pada pemilihan informasi yang tepat dan akurat untuk suatu kepentingan yang bertujuan pada solusi yang optimal untuk suatu kemungkinan (Scott, 1997).

Pendapat terkait tahun 1960-an dan 1970-an mewakili zaman keemasan kedua dari analisis strategis. Dunia Ketiga, gerakan yang tidak selaras, nasionalisme, dan terorisme sama validnya dengan masalah-masalah untuk dipelajari dengan standar lama hukum internasional, organisasi internasional, dan diplomasi kekuatan-kekuatan besar Eropa. Ada bagian baru yang sengaja melanggar profesionalisme dan berfokus pada isu-isu keamanan tradisional, tantangan militer, politik, dan ekonomi untuk keamanan negara, dan hal ini merupakan pilihan yang tersedia untuk melindungi dan mempertahankan kepentingannya.

Barry Buzan menyatakan bahwa keamanan didefinisikan sebagai suatu konsep sosial. Oleh karena itu, karena topik pembicaraan yang mempengaruhi stabilitas keamanan, suatu masalah dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan. Ketika aktor-aktor tertentu membangun cerita bahwa suatu masalah merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas tertentu, keamanan menjadi sangat

## Daftar Pustaka

- Bainus, Arry. dan Rahman, Junita B., 2017. Keamanan Internasional . *Journal of International Studies*. Volume (2), No. 1, November 2017 (1-5)
- Bull, Hedley (1977) *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, London: Macmillan
- Butterfield, Herbert (1966) 'The Balance of Power', in Herbert Butterfield and Martin Wight (eds), *Diplomatic Investigations*. London: Allen and Unwin
- Buzan, Barry, (1984). Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations. *Journal of Peace Research*, Vol. 21, No. 2, Special Issue on Alternative Defense.
- Buzan, Barry, (1991). "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", *International Affairs*,
- Buzan, Barry, (2015) *The English School: a neglected approach to International Security Studies*. *Security Dialogue*, 46 (2). pp. 126-143.
- Buzan, Barry, Ole Wæver and Jaap de Wilde (1998) *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner
- Holsti, K.J. (2004) *Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 83-277
- Katzenstein, Peter J. (ed.) (1996) *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, New York: Columbia University Press
- Kelleher, Chatherine. 2016. WAR, STRATEGY, and HISTORY: *The postwar Evolution of The Field of strategig Studies*. Australian University Press. pp 91-105
- Marston, Daniel., dan Leahy, Tamara. 2016. *War, Strategy and History: Essays in Honour of Professor Robert O'Neill*. ANU Press
- Mayall, James (2000a) *World Politics: Progress and its Limits*, Cambridge: Polity

- Pejcinovic, Lacy (2013) *War in International Society*, Abingdon: Routledge
- Rosenberg, Justin (2013) 'Kenneth Waltz and Leon Trotsky: Anarchy in the mirror of uneven and combined development', *International Politics*, 50:2, 183230.
- Scott, Sagan. 1997. Why Do State Build Nuclear Weapon? Three Models in Search of a Bomb. *International Security*, Vol. 21, No. 03 pp. 54-86
- Sudrajat, (2003). Perubahan Wajah Ancaman Dan Keamanan Domestik Indonesia. Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Wendt, Alexander (1999) *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press


## PROFIL PENULIS



### **Purwasandi**

Penulis adalah dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia. Ia memegang gelar Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik dari Universitas Pertahanan Indonesia. Karya akademiknya berfokus pada keamanan internasional, diplomasi, dan studi perdamaian dan konflik. Selain mengajar dan melakukan penelitian, ia telah berpartisipasi dalam beberapa program pelatihan internasional, termasuk di Naval Postgraduate School (AS), Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP), dan Universitas Pertahanan Nasional Kamboja. Ia telah menulis beberapa buku, antara lain *Pembangunan Keamanan Internasional melalui Diplomasi Nuklir dan Diplomasi Indonesia dengan UNESCO dalam Membangun Cagar Biosfer*. Ia juga telah menerbitkan artikel di jurnal akademik terkemuka, membahas topik-topik yang berkaitan dengan keamanan, diplomasi, studi perdamaian dan konflik, dan kebijakan strategis global.

Email: [purwasandi@lecturer.unri.ac.id](mailto:purwasandi@lecturer.unri.ac.id)



**BAB 5**  
**TRANSISI ENERGI**  
**DALAM PERSPEKTIF**  
**HUBUNGAN**  
**INTERNASIONAL**

---

**Umunnis Hidayati, M.InterDevPractice**  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Konsentrasi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil, industrialisasi, dan deforestasi telah meningkat secara signifikan dalam satu abad terakhir. Berbagai kesepakatan internasional seperti *Kyoto Protocol* (1997) dan *Paris Agreement* (2015) telah disepakati dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan (Baruch-Mordo et al., 2019). Hingga kini, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai rezim iklim global secara rutin mengadakan pertemuan tahunan (*the Conference of Parties*) yang mempertemukan kepala negara dan pemimpin dunia untuk merumuskan strategi transisi energi guna mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2050.

Pada tahun 2023 silam, *Conference of the Parties* ke-28 atau yang dikenal dengan COP28 Dubai telah menghasilkan lima resolusi penting, salah satunya adalah komitmen untuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil (*phase-out*) secara bertahap serta meningkatkan kapasitas energi terbarukan (UNFCCC, n.d.). Resolusi ini menandai semakin besarnya urgensi kolaborasi global dalam mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Meskipun kebijakan global dalam rezim iklim untuk dekarbonisasi telah mengalami kemajuan, pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil (Hamid et al., 2022). Ketergantungan ini menghambat percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi dilema antara tuntutan pembangunan ekonomi dan komitmen pengurangan emisi (Hidayati, 2024).

Negara-negara dengan cadangan minyak yang melimpah seperti Qatar, Bahrain dan Kuwait menghadapi tantangan tersendiri karena sektor energi fosil masih menjadi pilar utama perekonomian mereka (Peszko et al., 2020). Sementara itu, negara-negara maju di *Global North* semakin agresif mengalihkan investasi ke energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, dan persaingan antarhegemoni, khususnya Amerika Serikat dengan Tiongkok, juga memengaruhi

iklim investasi dan mekanisme pembiayaan transisi energi global. Ketimpangan ini pada akhirnya melebarkan jurang antara negara maju dan berkembang dalam hal akses serta kapasitas untuk bertransisi menjadi lebih hijau.

Transisi energi dalam konteks hubungan internasional bukan hanya sekadar pengurangan penggunaan bahan bakar tak terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, melainkan kehadiran dimensi geopolitik yang kompleks (Griffiths, 2019). Arena persaingan antarkekuatan besar dalam industri teknologi hijau tak terhindarkan, begitu juga kerja sama internasional (Zabelin & von Dongen, 2024). Transisi energi juga mengubah peta kekuatan global dengan munculnya kekuatan baru dalam kompetisi rantai pasok energi. Selain itu, kebutuhan akan pasokan sumber daya mineral kritis yang besar seperti *lithium* dan nikel (IEA, 2021) yang sebagian besar berada di zona tropis menjadikan negara yang memiliki sumber daya tersebut mulai memainkan dinamika politiknya dalam ekonomi global. Negara-negara yang masih bergantung pada energi konvensional juga mulai menghadapi tekanan-tekanan global untuk mendiversifikasi ekonominya (Jensen, 2024). Oleh karena itu, beberapa negara melihat transisi energi sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan energi dan hegemoni, sedangkan beberapa yang lain menghadapi ketidakpastian dan risiko lingkungan akibat ketergantungan pada industri berbasis fosil.

Bab ini akan membahas bagaimana transisi energi berkembang dalam dinamika hubungan internasional, dengan menyoroti perspektif teoretis serta peran kerja sama dan tata kelola global dalam mempercepat pergeseran menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Pada konteks ini, transisi energi tidak hanya menjadi isu teknis atau ekonomi semata, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik, negosiasi multilateral, serta perubahan norma dan kebijakan global. Bab ini juga diharapkan dapat menjadi *reference point* bagi pembaca yang ingin mendalami diskursus transisi energi dalam kerangka hubungan internasional dan dampaknya terhadap arsitektur tata kelola global di masa depan.

## Konsep Transisi Energi dalam Hubungan Internasional

Transisi energi merupakan pergeseran fundamental secara sistematis dan perlahan dalam sistem energi dari yang awalnya fokus pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batubara menuju sumber energi yang lebih bersih, terbarukan, dan berkelanjutan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi (Kowalska-Pyzalska, 2024). Perubahan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait serta penuh dengan dinamika kompleks (Yang et al., 2024). Momentum transisi energi tidak dapat dipisahkan dari urgensi krisis iklim yang semakin nyata sebagai tantangan global. Tingginya konsentrasi emisi karbon, pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, serta deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Namun, kemampuan setiap negara dalam bertransisi tidaklah seragam, bergantung pada kapasitas ekonomi, akses terhadap teknologi, serta komitmen politik dalam mengurangi emisi dan mengimplementasikan kebijakan energi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu determinan penting dalam mencapai target *net-zero 2050* adalah diplomasi energi. Diplomasi energi tradisional berfokus pada keamanan nasional dan pasokan bahan bakar fosil, yang sering kali tidak selaras dengan upaya global dalam mempercepat pengembangan serta penggunaan energi terbarukan. Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan dalam mencapai tujuan membatasi pemanasan global agar tidak melebihi 1,5°C di atas tingkat pra-industri seperti yang ditargetkan dalam *Paris Agreement* (Huda, 2024). Konsep dan praktik diplomasi energi dimulai sejak fase awal abad ke-20, saat itu sedang berkembang krisis minyak kedua (*the Second Oil Crisis*). Sejak itu, diplomasi energi lebih banyak berfokus pada sekuritisasi energi suatu negara dan kebijakan luar negeri untuk mendapatkan keamanan energi (*DiploFoundation*, 2021). Diplomasi energi tentunya menjadi sangat krusial saat ini karena adanya agenda pergeseran global untuk bertransisi menuju sumber energi yang lebih bersih.

Sayangnya, transisi energi, khususnya di negara-negara berkembang, masih menghadapi kondisi yang dilematis. Konsep *just*

## Daftar Pustaka

- Andresen, S., Skjærseth, J. B., Jevnaker, T., & Wettestad, J. (2016). The Paris agreement: Consequences for the EU and carbon markets? *Politics and Governance*, 4(3), 188–196. <https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.652>
- Baruch-Mordo, S., Kiesecker, J. M., Kennedy, C. M., Oakleaf, J. R., & Opperman, J. J. (2019). From Paris to practice: Sustainable implementation of renewable energy goals. *Environmental Research Letters*, 14(2), 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6e0>
- Caballero, M. D., Gunda, T., & McDonald, Y. J. (2023). Energy justice & coastal communities: The case for Meaningful Marine Renewable Energy Development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 184, 113491. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113491>
- Cohn, T. H. (2003). *Global political economy: Theory and practice*. Longman Publishing Group.
- Critical minerals – topics*. (n.d.). IEA. Retrieved March 13, 2025, from <https://www.iea.org/topics/critical-minerals>
- Delfino Silva, E. C. (2017a). Self-Enforcing agreements under unequal nationally determined contributions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2978774>
- Delfino Silva, E. C. (2017b). Self-Enforcing agreements under unequal nationally determined contributions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2978774>
- DiploFoundation. (2021). Diplo. <https://www.diplomacy.edu/topics/energy-diplomacy/>
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>
- Fithriana, A., & Dewi, E. S. (2023). EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUSIONALISME UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 352–364. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1885>

- Gökçe, O. Z., Hatipoglu, E., & Soytaş, M. A. (2021). The pacifying effect of energy dependence on interstate conflict: A Large-N analysis. *Energy Research & Social Science*, 78, 102133. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102133>
- Gonzales-Iwanciw, J., Karlsson-Vinkhuyzen, S., & Dewulf, A. (2023). How does the UNFCCC enable multi-level learning for the governance of adaptation? *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 23(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09591-0>
- Griffiths, S. (2019). Energy diplomacy in a time of energy transition. *Energy Strategy Reviews*, 26, 100386. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100386>
- Hamid, I., Alam, M. S., Kanwal, A., Jena, P. K., Murshed, M., & Alam, R. (2022). Decarbonization pathways: The roles of foreign direct investments, governance, democracy, economic growth, and renewable energy transition. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(33), 49816–49831. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-18935-3>
- Healy, N., Stephens, J. C., & Malin, S. A. (2019). Embodied energy injustices: Unveiling and politicizing the transboundary harms of fossil fuel extractivism and fossil fuel supply chains. *Energy Research & Social Science*, 48, 219–234. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.09.016>
- Hidayati, U. (2024). Exploring the Nexus of Climate Change, Energy Justice, and Sustainability. *Jurnal Politik Global*, 1(1), 1–20.
- Huda, M. S. (2024). Renewable energy diplomacy and transitions: An environmental peacebuilding approach. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 50, 100815. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100815>
- IEA. (2021). *The role of critical minerals in clean energy transitions – analysis*. IEA. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- IEA – International Energy Agency. (n.d.). IEA. Retrieved March 23,

- 2025, from <https://www.iea.org/>
- Industrial energy consumers to White House: "No benefit" to Paris Agreement.* (2017, May 16). Competitive Enterprise Institute. <https://cei.org/blog/industrial-energy-consumers-to-white-house-no-benefit-to-paris-agreement/>
- IRENA – international renewable energy agency.* (n.d.). Retrieved March 23, 2025, from <https://www.irena.org/>
- Jaybhay, R. (2020, April 13). *The Kootneeti.* The Kootneeti. <https://thekootneeti.in/2020/04/13/neo-realist-perspective-energy-security/>
- Jensen, L. (2024). The economic and fiscal transition costs of global climate mitigation in fossil fuel export dependent economies. *Resources Policy*, 96, 105234. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105234>
- Kowalska-Pyzalska, A. (2024). Introduction to innovative energy services (IES) in transitioning energy markets. In *Diffusion of Innovative Energy Services* (pp. 1–19). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-822882-1.00007-x>
- Mirzania, P., Gordon, J. A., Balta-Ozkan, N., Sayan, R. C., & Marais, L. (2023). Barriers to powering past coal: Implications for a just energy transition in South Africa. *Energy Research & Social Science*, 101, 103122. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103122>
- Nations, U. (n.d.). *United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972.* United Nations. Retrieved March 23, 2025, from <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
- Overview of the Bipartisan Infrastructure Law and the Inflation Reduction Act.* (2024, December 18). KLRD. <https://klrd.gov/2024/12/18/overview-of-the-bipartisan-infrastructure-law-and-the-inflation-reduction-act/>
- Peszko, G., Mensbrugge, D. van der, Golub, A., Ward, J., Zenghelis, D., Marijs, C., Schopp, A., Rogers, J., & Midgley, A. (2020). *Diversification*

*and cooperation in a decarbonizing world: Climate strategies for fossil fuel-dependent countries.* World Bank Publications.

- Rodríguez-Fernández, L., Carvajal, A. B. F., & de Tejada, V. F. (2022). Improving the concept of energy security in an energy transition environment: Application to the gas sector in the European Union. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101045. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101045>
- Shapovalova, D. (2021). In defence of the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. In *Debating Climate Law* (pp. 63–75). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108879064.006>
- Subhadra, B. G. (2011). Macro-level integrated renewable energy production schemes for sustainable development. *Energy Policy*, 39(4), 2193–2196. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.019>
- UNFCCC. (n.d.). United Nations Climate Change. Retrieved March 13, 2025, from <https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways#end-of-fossil-fuels>
- Victor, D. G., Akimoto, K., Kaya, Y., Yamaguchi, M., Cullenward, D., & Hepburn, C. (2017). Prove Paris was more than paper promises. *Nature*, 548(7665), 25–27. <https://doi.org/10.1038/548025a>
- Yang, Y., Xia, S., Huang, P., & Qian, J. (2024). Energy transition: Connotations, mechanisms and effects. *Energy Strategy Reviews*, 52, 101320. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101320>
- Zabelin, D., & von Dongen, D.-M. (2024, October 28). How geopolitics will both hinder and accelerate the global energy transition. *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/stories/2024/10/geopolitics-energy-transition/>


## PROFIL PENULIS



### **Umannisa Hidayati, M.InterDevPractice.**

Penulis adalah dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman, ia telah terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan, termasuk magang, kegiatan sukarelawan, dan pekerjaan profesional di sektor-sektor seperti kebencanaan, pengembangan masyarakat, layanan kesehatan primer, pengembangan pemuda, gender, dan pembangunan berkelanjutan. Umannisa menamatkan pendidikan *S2 Master of International Development* di Monash University, Australia, pada tahun 2018 dan Sarjana Psikologi dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Selama studinya, ia aktif berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan konferensi, termasuk konferensi *Australian Council for International Development* di Sydney pada tahun 2018 dan program pertukaran pemuda untuk mempelajari pendidikan dan teknologi kebencanaan di Jepang pada tahun 2012.

Email: [umunnisahidayati@lecturer.unri.ac.id](mailto:umunnisahidayati@lecturer.unri.ac.id)



**BAB 6**

**PERDAGANGAN**

**MANUSIA SEBAGAI**

**ANCAMAN KEAMANAN**

**MANUSIA DALAM**

**HUBUNGAN**

**INTERNASIONAL**

---

Fatmawati, S.Sos., M.Si.  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Dalam kajian hubungan internasional, konsep keamanan telah terlalu lama diartikan secara sempit, yaitu keamanan wilayah dari serangan militer atau ancaman nuklir. Negara-negara didorong untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya pada strategi pertahanan demi menjaga keutuhan wilayah negara. Namun, pasca Perang Dingin, paradigma keamanan berubah cakupannya dari negara menjadi individu, dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer, tetapi juga berupa ancaman non-militer. Kini, eksistensi manusia mendapatkan perhatian yang lebih besar, sehingga memunculkan konsepsi keamanan manusia.

Salah satu ancaman terhadap keamanan manusia yang semakin mendapatkan perhatian dunia adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Fenomena ini tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga mengancam harkat dan martabat manusia secara langsung. UNODC (2023) mencatat bahwa setiap tahun puluhan ribu kasus perdagangan manusia terdeteksi di seluruh dunia, dengan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Kompleksitas masalah ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan stabilitas internasional.

Dalam hubungan internasional, isu perdagangan manusia berkembang menjadi perhatian global melalui berbagai forum multilateral, kesepakatan internasional, serta kerangka kerja sama regional maupun bilateral. Lahirnya berbagai instrumen internasional seperti Protokol Palermo pada tahun 2000 menunjukkan adanya konsensus internasional bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap keamanan manusia yang harus diatasi bersama.

Bab ini akan membahas perdagangan manusia sebagai ancaman keamanan manusia dalam perspektif hubungan internasional. Pembahasan diawali dengan reorientasi studi keamanan dari paradigma tradisional menuju non-tradisional, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai lahirnya konsep *human security* dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya, akan dibahas posisi isu

perdagangan manusia dalam dinamika global, bagaimana praktik tersebut mengancam keamanan manusia, serta bagaimana kerangka kerja sama internasional berperan dalam upaya pemberantasannya.

## **Reorientasi Studi Keamanan dalam Hubungan Internasional**

Studi keamanan sebagai salah satu subkajian dalam hubungan internasional telah didominasi oleh pendekatan realisme sejak awal, terutama saat Perang Dingin berlangsung. Dalam kerangka realisme, keamanan suatu negara merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (Morgenthau & Thompson, 2006). Pendekatan ini mengharuskan negara untuk meningkatkan kapabilitas militer dalam menjaga keberlangsungan hidup. Sebagaimana dikatakan oleh pemikir realisme, Hans J. Morgenthau, bahwa *“The meaning of national interest is survival - the protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation-states”* (Morgenthau, 1952). Morgenthau melihat negara sebagai pelaku utama setiap tindakan yang dilakukan dalam upaya mengamankan wilayahnya dari ancaman pihak luar. Oleh karena itu, perspektif realisme telah mengarahkan fokus studi keamanan menjadi tradisional, yaitu sangat militeristik, berkisar pada strategi pertahanan, pembentukan aliansi, dan peningkatan kemampuan militer untuk bersiap menghadapi ancaman kekuatan lain, bahkan perang.

Perspektif neorealisme memperkuat pandangan realisme tentang keamanan tradisional. Kenneth Waltz menyatakan bahwa keamanan pada dasarnya adalah tentang negara sebagai aktor utama dan ancaman militer eksternal sebagai isu sentral. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai entitas rasional yang beroperasi dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mampu menjamin perdamaian dan keteraturan secara global (Kenneth, 1979). Dalam struktur sistem internasional yang anarki mendorong negara untuk bertindak *self-help* demi kelangsungan hidupnya. Konsekuensinya, studi keamanan dalam paradigma

neorealisme sama dengan realisme, yaitu cenderung fokus pada strategi militer, konflik antarnegara, aliansi pertahanan, dan perlombaan senjata. Studi keamanan pun berkembang dalam bingkai militeristik dan negara-sentris, dengan mengesampingkan ancaman non-tradisional dan hanya terbatas pada aktor non-negara.

Berakhirnya Perang Dingin telah memberikan perubahan signifikan terhadap studi keamanan. Konsep keamanan yang pada awalnya hanya berorientasi pada kajian tradisional yang bersifat militeristik dan fokus pada aktor negara, kini mulai mengalami transformasi dengan memasukkan kajian non-tradisional (*non-militeristik*), seperti isu perdagangan manusia, migrasi ilegal, penyebaran penyakit, tingkat polusi, serta kemunculan aktor non-negara. Isu keamanan non-tradisional mulai muncul di akhir dekade 1990-an ketika sekelompok ahli yang disebut mazhab Kopenhagen, seperti Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, mencoba memperluas fokus keamanan dengan memasukkan berbagai aspek yang tidak biasa dikaji dalam studi keamanan tradisional. Aspek-aspek tersebut di antaranya masalah pangan yang tidak cukup, ancaman kelaparan dan kemiskinan, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan lainnya, di mana semua isu tersebut dianggap juga sebagai bagian dari studi keamanan. Kelompok pemikir ini secara tegas berusaha memperluas topik pembahasan isu keamanan, tidak hanya fokus pada keamanan negara saja, tetapi juga mulai membahas keamanan manusia. Keamanan manusia menjadi perhatian yang serius saat ini, dan terus berkembang dalam studi keamanan.

### **Lahirnya Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Awalnya, konsep keamanan manusia (*human security*) diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Laporan Tahunan UNDP yang berjudul *Human Development Report* pada tahun 1994. UNDP menyatakan "*human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities*" (UNDP, 1994). Definisi keamanan manusia dari

## Daftar Pustaka

- Allain, J. (2012). *The Law and Slavery: Prohibiting Human Exploitation*. Leiden: Brill.
- Europol. (2025). Trafficking in human beings. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings>
- Frontex. (2023). 212 arrests, 1426 victims identified in a global operation against human trafficking. Retrieved from <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/212-arrests-1426-victims-identified-in-a-global-operation-against-human-trafficking-cZOAGy>
- Giovagnoni, B & Schooneveld, A.V. (2022). The History of Human Trafficking. *The Exodus Road*. Retrieved from <https://Theexodusroad.Com/History-of-Human-Trafficking/>.
- Iles, J. W., & Biles, R. E. (2023). *International Agreement Targets White Slave Trade*. EBSCO. Retrieved from <https://Www.Ebsco.Com/Research-Starters/History/International-Agreement-Targets-White-Slave-Trade>.
- Morgenthau, H. J. (1952). Another “great debate”: the national interest of the United States. *American Political Science Review*, 46(4), 961–988. <https://doi.org/10.2307/1952108>
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (2006). *Politik antarbangsa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Netsweeper. (2025). *A Global Call To End Human Trafficking: What July 30 Represents*. Retrieved from <https://Www.Netsweeper.Com/Filtering/a-Global-Call-to-End-Human-Trafficking-What-July-30-Represents>.
- Rout, P. C., Danish, M. F., Swain, A., & Behera, S. (2024). Analyzing the Palermo Protocol on Human Trafficking: Implementation, Efficacy and Challenges. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 6(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4740886>
- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge

University Press.

The Bali Process. (2025). About The Bali Process. Retrieved from <https://www.baliprocess.net/about-the-bali-process/>

United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Vienna: United Nations Publication.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *Human Trafficking*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. Vienna: United Nations Publication.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. Vienna: United Nations Publication.

United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

United Nations. (2025). *UNODC and the EU Anti-Trafficking Coordinator urge global action to dismantle organized criminal networks behind human trafficking*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/news/2025/july/unodc-and-the-eu-anti-trafficking-coordinator-urge-global-action-to-dismantle-organized-criminal-networks-behind-human-trafficking.html>

Waltz. K.N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley  
Publishing Company.


## PROFIL PENULIS



### **Fatmawati, S.Sos, M.Si.**

Penulis memulai pendidikan S1 di Universitas Abdurrab Pekanbaru pada Program Studi Hubungan Internasional tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi S2 pada tahun 2019 di Pascasarjana Universitas Riau jurusan Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional. Setelah menyelesaikan pendidikannya, penulis mengajar di Universitas Persada

Bunda Indonesia sebagai dosen luar biasa mulai tahun 2022 hingga saat ini, sebagai dosen tetap di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Abdurrab mulai tahun 2022 hingga 2025, dan menjadi tutor di Universitas Terbuka sejak tahun 2025. Penulis pernah melaksanakan tugas struktural sebagai Sekretaris Program Studi dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Abdurrab. Sejak tahun 2025, penulis bertugas sebagai dosen pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Penulis memiliki bidang keilmuan pada studi keamanan. Sebagai peneliti, beberapa penelitian telah didanai eksternal oleh Kemdikbudristek DIKTI dan didanai internal oleh Universitas Abdurrab. Selain itu, penulis juga aktif melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skema pendanaan secara internal dari Universitas Abdurrab, dan mandiri. Penulis juga menjadi pembicara pada kegiatan webinar atau seminar hingga saat ini.



**BAB 7**

**TATA KELOLA PERDAGANGAN  
DIGITAL INDONESIA DALAM  
NEGOSIASI *E-COMMERCE*  
INTERNASIONAL: ANALISIS  
STRATEGIS POSISI INDONESIA  
DALAM ERA TRANSFORMASI  
DIGITAL GLOBAL**

---

Arya Luthfi Permadi, S.IP., M.Si.  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Ekonomi digital Asia Tenggara telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data laporan *e-Conomy SEA 2021-2024*, nilai total transaksi digital (*Gross Merchandise Value*) kawasan tumbuh dari \$174 miliar pada tahun 2021 menjadi \$263 miliar pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten meskipun menghadapi tantangan makroekonomi global (Google, Temasek, 2021, 2022, 2023, 2024). Kawasan ini telah membuktikan diri sebagai salah satu motor penggerak ekonomi digital global, dengan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan.

Pertumbuhan ekonomi digital yang fenomenal ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di balik angka-angka yang mengesankan tersebut, terdapat kompleksitas tata kelola perdagangan digital yang melibatkan negosiasi internasional yang rumit. World Trade Organization (WTO) Joint Statement Initiative (JSI) on Electronic Commerce menjadi arena utama di mana masa depan aturan perdagangan digital global ditentukan. Pada tanggal 26 Juli 2024, inisiatif yang melibatkan 91 negara peserta ini berhasil mencapai stabilisasi teks *Agreement on Electronic Commerce*, menandai tonggak penting dalam sejarah perdagangan digital internasional (Vergano & Dolle, 2024).

Namun, Indonesia mengambil posisi yang menarik dalam dinamika ini. Meskipun menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia belum menandatangani kesepakatan tersebut dan masih melakukan konsultasi domestik. Posisi ini mencerminkan dilema strategis yang dihadapi Indonesia: di satu sisi ingin memanfaatkan peluang perdagangan digital global, di sisi lain berusaha melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan digital.

Artikel ini bertujuan menganalisis posisi strategis Indonesia dalam negosiasi *e-commerce* internasional, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam merumuskan tata kelola perdagangan digital yang optimal. Analisis ini menjadi penting mengingat keputusan yang diambil Indonesia dalam konteks ini akan

berdampak signifikan terhadap masa depan ekonomi digital nasional dan posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan digital global. Tantangan Indonesia dalam negosiasi *e-commerce* internasional mencerminkan kompleksitas ekonomi politik global yang melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, Indonesia harus menavigasi tekanan liberalisasi dari negara maju sambil mempertahankan kedaulatan digital dan melindungi kepentingan ekonomi domestik.

## **Transformasi Ekonomi Digital Asia Tenggara: Momentum dan Dinamika Pertumbuhan**

Asia Tenggara telah mengalami transformasi digital yang luar biasa dalam dekade terakhir. Berdasarkan data *e-Conomy SEA 2021-2024*, ekonomi digital kawasan menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dengan pergeseran prioritas dari pertumbuhan yang berfokus pada pengguna ke model yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

### **1. Dominasi Sektor *E-commerce* dan Inovasi Digital**

Sektor *e-commerce* tetap menjadi pendorong pertumbuhan terbesar dalam ekonomi digital di Asia Tenggara. GMV *e-commerce* meningkat dari \$120 miliar pada tahun 2021 menjadi \$159 miliar pada tahun 2024. Inovasi penting yang menonjol adalah *video commerce* yang melonjak drastis, menyumbang 20% dari total GMV *e-commerce* pada tahun 2024, naik dari kurang dari 5% pada tahun 2022.

Fenomena ini mencerminkan adopsi teknologi yang semakin canggih dalam ekosistem digital Asia Tenggara. *Video commerce*, sebagai bentuk perdagangan yang menggabungkan konten video interaktif dengan transaksi langsung, telah menjadi tren yang mengubah paradigma belanja online tradisional, menunjukkan bahwa konsumen di kawasan tidak hanya mengadopsi teknologi digital tetapi juga mendorong inovasi dalam model bisnis digital.

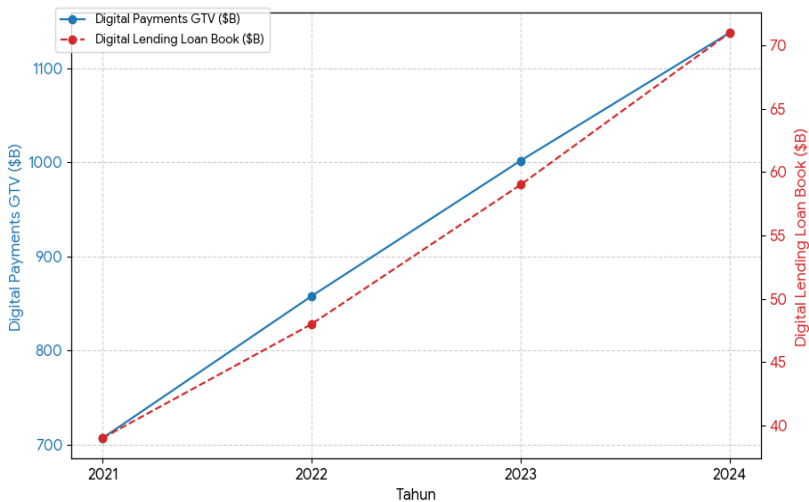
### **2. Revolusi Layanan Keuangan Digital**

Sektor layanan keuangan digital menunjukkan pertumbuhan yang paling mengesankan. Total *Gross Transaction Value (GTV)* pembayaran digital melonjak dari \$707 miliar pada tahun 2021

menjadi \$1,138 miliar pada tahun 2024. Adopsi kode QR yang meluas telah menjadi katalisator utama pertumbuhan ini, memfasilitasi transaksi pembayaran digital di seluruh wilayah.

Saldo pinjaman digital juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, meningkat dari \$39 miliar pada tahun 2021 menjadi \$71 miliar pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan kematangan ekosistem *fintech* di Asia Tenggara, di mana layanan keuangan digital tidak hanya menjadi alternatif tetapi mulai menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Tren Layanan Keuangan Digital Asia Tenggara (2021-2024)



**Gambar 7.1: Tren Layanan Keuangan Digital Asia Tenggara (2021-2024)**

Sumber: E-Conomy SEA 2021-2024

### 3. Pergeseran Paradigma Menuju Profitabilitas Berkelanjutan

Salah satu tren paling signifikan adalah pergeseran fokus dari pertumbuhan berbasis pengguna menuju model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Laba industri mengalami pertumbuhan luar biasa, berlipat ganda sebesar 2,5 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Total pendapatan tumbuh dari \$78 miliar pada tahun 2022 menjadi \$89 miliar pada tahun 2024, dan laba naik dari \$4 miliar pada tahun 2022 menjadi \$11 miliar pada tahun 2024.

## Daftar Pustaka

- Antara News. (2024). *Kemenkop UKM: 25,5 juta UMKM telah “go digital”* - ANTARA News. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4397157/kemenkop-ukm-255-juta-umkm-telah-go-digital>
- Arindrajit Basu. (2021). *Can the WTO build consensus on digital trade?* / Hinrich Foundation. Hinrich Foundation. <https://www.hinrichfoundation.com/research/article/digital/can-the-wto-build-consensus-on-digital-trade/>
- Darmastuti, S., Nidatya, N., Saraswati, D. P., & Nashir, A. K. (2025). Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi Digital: Tinjauan terhadap ASEAN Digital Economy Framework Agreement. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 7(2), 85–103. <https://doi.org/10.33753/madani.v7i2.375>
- David E. Bond, Richard Eglin, Neeraj Rajan Sabitha, & Ian Saccomanno. (2024). *WTO Extends E-Commerce Tariff Moratorium as Broader Negotiations Continue* | White & Case LLP. White & Case. <https://www.whitecase.com/insight-alert/wto-extends-e-commerce-tariff-moratorium-broader-negotiations-continue>
- Dimitropoulos, G. (2025). Digital Plurilateralism in International Economic Law Towards Unilateral Multilateralism? *Journal of World Investment and Trade*, 26, 116–155. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340354>
- Ginanjari, Y., & Auliya, P. (2024). Complexity of the Government and Governance in ASEAN Members: Issues and Challenges. *Journal Of Global Strategic Studies*, 4(2), 206–229. <https://doi.org/10.36859/jgss.v4i2.3007>
- Google, Temasek, & B. & C. (2021). *e-Economy SEA 2021*. [https://www.bain.com/globalassets/noindex/2021/e\\_economy\\_sea\\_2021\\_report.pdf](https://www.bain.com/globalassets/noindex/2021/e_economy_sea_2021_report.pdf)
- Google, Temasek, & B. & C. (2022). *e-Economy SEA 2022*. In *Google, Temasek, Bain & Company*. <https://www.bain.com/insights/economy-sea-2022/>

- Google, Temasek, & B. & C. (2023). *e-Economy SEA 2022*.
- Google, Temasek, & B. & C. (2024). *e-Economy SEA 2024*.
- Hannes Berggren. (2024). *WTO e-commerce negotiations finalised* / *Kommerskollegium*. Kommerskollegium.  
<https://www.kommerskollegium.se/en/analyses-and-seminars/trade-policy-insights/important-but-modest-success-as-wto-e-commerce-negotiations-are-finalised/>
- Indonesia.go.id. (2021). *Indonesia.go.id - Mengoptimalkan Digitalisasi UMKM*. Indonesia.Go.Id.  
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2890/mengoptimalkan-digitalisasi-umkm>
- Kim, Y. K., Go, M. H., Kim, S., Lee, J., & Lee, K. (2023). Evaluating Cybersecurity Capacity Building of ASEAN Plus Three through Social Network Analysis. *Journal of Internet Technology*, 24(2), 495–505. <https://doi.org/10.53106/160792642023032402031>
- Lee, B. T. F., Kornphetcharat, K., Sims, J. P., Linh Dieu, D., & Salman Ali, B. (2025). ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy: Combating Cyber Terrorism and Hackers Through CERT Coordination. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*, 7(1), 20–30. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0701.788>
- Nur, M., Asmorojati, A. W., Megawati, Zuliyah, S., & Isdiyanto, I. Y. (2023). A Comparative Assessment of Digital Platform Worker Protection in the EU and ASEAN. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 367–390. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29823>
- Rizki, A. (2024). *Menavigasi Inovasi: Perjalanan Regulatory Sandbox Indonesia - Tech For Good Institute*. Tech For Good Institute. <https://techforgoodinstitute.org/uncategorized/menavigasi-inovasi-perjalanan-regulatory-sandbox-indonesia/>
- Su, L. (2024). Research on the Current Situation and Problems of Digital Economy Trade between China and ASEAN Countries. *Open Journal of Business and Management*, 12(01), 148–157. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2024.121010>
- Vásquez Callo-Müller, M., & Kugler, K. (2023). Digital Trade,

- Development, and Inequality. *AJIL Unbound*, 117, 116–121.  
<https://doi.org/10.1017/aju.2023.17>
- Vergano, P. R., & Dolle, T. (2024). *A new dawn for digital trade? WTO Members conclude negotiations for a plurilateral Agreement on Electronic Commerce* - Lexology. Lexology.  
<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1767028a-7ec6-4a95-8ca6-2db03fba4c90>
- WTO Plurilaterals. (n.d.). *E-Commerce Plurilateral - WTO Plurilaterals Info*. Geneva Trade Platform. Retrieved August 14, 2025, from [https://wtoplurilaterals.info/plural\\_initiative/e-commerce/](https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/e-commerce/)
- Zulianto, M. (2024). ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Opportunities and Challenges for Vietnam. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 10(1), 53–62.  
<https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.214>

## PROFIL PENULIS



### **Arya Luthfi Permadi, S.IP, M.Si.**


Penulis lahir di Pekanbaru, penulis memulai perjalanan akademiknya di bidang Hubungan Internasional pada tahun 2015 dengan menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Riau. Ketertarikannya yang mendalam pada dinamika politik global dan ekonomi digital mendorongnya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di program Ilmu Politik dengan konsentrasi Hubungan Internasional di universitas yang sama, yang diselesaikannya pada tahun 2019.

Saat ini, penulis mengabdikan dirinya sebagai dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau, dengan fokus pada pengajaran dan penelitian tentang isu-isu ekonomi politik Indonesia dan diplomasi ekonomi digital. Keahliannya di bidang digital dan bisnis tidak terbatas pada ranah akademik, tetapi juga dipraktikkan melalui pengalamannya sebagai kreator konten ekonomi yang aktif mengkomunikasikan konsep ekonomi politik kepada khalayak yang lebih luas.

Dedikasi dan kontribusinya di bidang digitalisasi telah diakui melalui prestasi sebagai Presenter Terbaik di seminar internasional dan nasional tentang digitalisasi. Penghargaan ini mencerminkan kemampuannya untuk menyampaikan ide-ide kompleks tentang transformasi digital dengan cara yang inovatif dan mudah dipahami.

Kombinasi unik antara latar belakang akademis yang kuat dalam Hubungan Internasional dan pemahaman praktis tentang ekonomi digital memberikan penulis perspektif komprehensif dalam menganalisis berbagai isu kontemporer. Melalui berbagai penelitian dan publikasi, penulis berupaya menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan realitas praktis di era transformasi digital. Author

Email: [arya.luthfi@lecturer.unri.ac.id](mailto:arya.luthfi@lecturer.unri.ac.id)



**BAB 8**  
**STRATEGI *HEDGING***  
**NEGARA KECIL DI**  
**KAWASAN TELUK DALAM**  
**MENGHADAPI RIVALITAS**  
**SAUDI-IRAN**

---

**Munawir Siahaan, M.Si.**  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Keamanan merupakan prioritas utama bagi setiap negara di tengah ketidakpastian sistem internasional. Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, kelangsungan hidup merupakan tujuan utama setiap negara (Walt, 1987). Dalam sistem internasional yang terus berubah, negara-negara kecil di kawasan Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka. Di tengah rivalitas yang intens antara dua kekuatan besar regional, yaitu Arab Saudi dan Iran, negara-negara kecil ini harus memainkan peran yang cermat dalam merumuskan kebijakan luar negeri mereka (Hamdi and Salman, 2020).

Persaingan kekuatan ini membawa ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan diplomatik, militer, dan ekonomi negara-negara kecil, yang terpaksa memilih antara berbagai aliansi dan strategi keamanan (Lim and Cooper, 2015). Sebagian besar negara kecil ini berusaha menjaga otonomi mereka di tengah ketegangan global dan regional yang terus meningkat (Kuik, 2021). Negara-negara kecil di kawasan ini menghadapi ketidakmampuan untuk memilih satu kekuatan besar sebagai sekutu utama tanpa menanggung risiko yang besar. Di satu sisi, aliansi dengan Arab Saudi dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas, tetapi di sisi lain, ketegangan dengan Iran tetap menjadi ancaman. Sebaliknya, meskipun menjaga hubungan dengan Iran dapat mengurangi ancaman, tetapi posisi ini dapat membawa risiko ketidakstabilan dari sisi Saudi (Hamdi and Salman, 2020).

*Hedging* menjadi instrumen penting bagi negara-negara kecil Teluk untuk menghadapi dilema ini. Strategi *hedging* memungkinkan negara-negara Teluk untuk mengurangi risiko dan mempertahankan otonomi mereka tanpa terjebak dalam persaingan terbuka antara kedua kekuatan besar ini (Lim and Cooper, 2015; Salman, Pieper and Geeraerts, 2015). Dengan strategi ini, negara kecil dapat menjaga hubungan yang relatif seimbang dengan kekuatan yang saling bersaing, sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi, politik, dan keamanan tanpa harus terikat secara penuh pada salah satu pihak (Kuik, 2021). Negara-negara kecil di Teluk seperti Qatar, Kuwait, dan

Oman tidak sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan besar, tetapi justru memilih untuk menjalin hubungan yang seimbang dengan kedua negara tersebut.

Bab ini akan membahas *hedging* sebagai strategi yang diterapkan oleh negara-negara kecil di Teluk dalam menghadapi rivalitas Saudi-Iran. Fokus utamanya adalah memahami konsep *hedging* dalam Hubungan Internasional (HI), relevansinya bagi negara kecil, risiko yang menyertainya, serta melihat penerapan strategi *hedging* di Teluk. Kawasan ini dipilih karena Teluk merepresentasikan kawasan dengan kepentingan energi global yang tinggi dan dominasi rivalitas kekuatan besar yaitu Saudi-Iran. Bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi *hedging* bagi negara kecil dalam hubungan internasional sehingga dapat menjadi landasan analitis dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif dan fleksibel di tengah rivalitas kekuatan besar.

### **Konsep *Hedging* dalam Hubungan Internasional**

Perbedaan *power* merupakan faktor utama yang membedakan posisi masing-masing negara. Stephen Walt (1987) menegaskan bahwa negara tidak bereaksi semata terhadap kapasitas kekuatan pihak lain, melainkan terhadap “kekuatan asing yang dianggap menimbulkan ancaman terbesar” (*threatening power*) (Walt, 1987). Dengan kata lain, negara tidak hanya menilai potensi ancaman berdasarkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain, tetapi juga seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kekuatan tersebut terhadap kelangsungan hidup atau kepentingan nasional mereka.

Ketika merespons ancaman eksistensial, negara memilih untuk mengikuti logika *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* mengandaikan bahwa negara memutuskan untuk merespons ancaman dengan menentanginya. Negara dapat memilih untuk membangun kapasitas militernya sendiri, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam mempertahankan diri dari negara yang mengancam. Alternatifnya, atau secara bersamaan, negara dapat membangun aliansi untuk mengamankan kekuatan negara lain yang memiliki kepentingan keamanan serupa, agar dapat dimintai bantuan bila diperlukan (Waltz, 1979).

## Daftar Pustaka

- Akbulut, H. (2016) *NATO, cooperative security, and the Middle East status and prospects*. Austrian Institute for International Affairs. Available at: [https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/59224/ssoar-2017-akbulut-NATO\\_Cooperative\\_Security\\_and\\_the.pdf](https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/59224/ssoar-2017-akbulut-NATO_Cooperative_Security_and_the.pdf).
- Burt, E. (2017) 'Qatar and Iran: Odd bedfellows'. Wilson Center. Available at: <https://www.wilsoncenter.org/article/qatar-and-iran-odd-bedfellows>.
- Cafiero, G. (2019) 'Iran and the Gulf states 40 years after the 1979 revolution', *Middle East Institute* [Preprint]. Available at: <https://www.mei.edu/publications/iran-and-gulf-states-40-years-after-1979-revolution>.
- Cafiero, G. and Wagner, D. (2016) 'Turkey and Qatar's burgeoning strategic alliance'. Middle East Institute. Available at: <https://www.mei.edu/publications/turkey-and-qatars-burgeoning-strategic-alliance>.
- Choi, I. (1995) *Small states and the balance of power*. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/36724174.pdf>.
- Chubin, S. and Tripp, C. (2014) *Iran-Saudi Arabia relations and regional order*. Oxon, UK: Routledge.
- Foot, R. (2006) 'Chinese strategies in a US-hegemonic global order: Accommodating and hedging', *International Affairs*, 82(1), pp. 77-94.
- Goh, E. (2005) *Meeting the China challenge: The U.S. in southeast Asian regional security strategies*. Honolulu: EastWest Center.
- Hamdi, S. and Salman, M. (2020) 'The hedging strategy of small Arab Gulf states', *Asian Politics & Policy*, 12(2), pp. 127-152.
- He, K. and Feng, H. (2023) *After Hedging: Hard Choices for the Indo-Pacific States between the US and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hiep, L.H. (2013) 'Vietnam's hedging strategy against China since normalization', *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), pp. 333-368.

- Ibish, H. (2017) *The UAE's evolving national security strategy*. The Arab Gulf States Institute in Washington. Available at: [https://agsiw.org/wp-content/uploads/2017/04/UAE-Security\\_ONLINE.pdf](https://agsiw.org/wp-content/uploads/2017/04/UAE-Security_ONLINE.pdf).
- Jackson, D. (2017) *Kuwaiti relations with Iraq in the post-Saddam era: Strategic hedging, regional effects & the structural power of small states*. Available at: [https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52317/Jackson\\_Kuwaiti\\_Relations\\_with\\_Iraq\\_in\\_the\\_post-Saddam\\_Era.pdf?sequence=3](https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/52317/Jackson_Kuwaiti_Relations_with_Iraq_in_the_post-Saddam_Era.pdf?sequence=3).
- Koga, K. (2018) 'The concept of "hedging" revisited: The case of Japan's foreign policy strategy in East Asia's power shift', *International Studies Review*, 20(4), pp. 633–660.
- Kostiner, J. (2009) *Conflict and cooperation in the Gulf region*. Wiesbaden, Germany: Springer Science & Business Media.
- Kuik, C.-C. (2021) 'Getting hedging right: A small-state perspective', *China International Strategy Review*, 3(2), pp. 300–315. Available at: <https://doi.org/10.1007/s42533-021-00089-5>.
- Lim, D. and Cooper, Z. (2015) 'Reassessing hedging: The logic of alignment in East Asia', *Security Studies*, 24(4), pp. 696–727.
- Lons, C. (2018) 'Oman: Between Iran and a hard place'. European Council on Foreign Relations. Available at: [https://www.ecfr.eu/article/commentary\\_oman\\_between\\_iran\\_and\\_a\\_hard\\_place1](https://www.ecfr.eu/article/commentary_oman_between_iran_and_a_hard_place1).
- Medeiros, E.S. (2005) 'Strategic hedging and the future of Asia-pacific stability', *The Washington Quarterly*, 29(1), pp. 145–167. Available at: <https://doi.org/10.1162/016366005774859724>.
- Mulia, K.P. (2022) *Hedging dalam ilmu hubungan internasional = Hedging in international relations*. Universitas Indonesia.
- Ramani, S. (2017) 'The Saudi-UAE alliance could be weaker than it appears'. The National Interest. Available at: <https://nationalinterest.org/feature/the-saudi-uae-alliance-could-be-weaker-it-appears-23606>.

- Ramani, S. (2018) 'Growing Kuwaiti influence in the Gulf', *Gulf State Analytics* [Preprint]. Available at: <https://gulfstateanalytics.com/growing-kuwaiti-influence-gulf/>.
- Rivera, J. (no date) 'Iran's involvement in Bahrain: a battleground as part of the Islamic Regime's larger existential conflict', *Small Wars Journal* [Preprint]. Available at: <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/iran's-involvement-in-bahrain>.
- Salman, M. (2017) 'Strategic hedging and unipolarity demise: The case of China's strategic hedging', *Asian Politics & Policy*, 9(3), pp. 354-377.
- Salman, M. and Geeraerts, G. (2015) 'Strategic hedging and China's economic policy in the Middle East', *China Report*, 51(2), pp. 102-120.
- Salman, M., Pieper, M. and Geeraerts, G. (2015) 'Hedging in the Middle East and China-US competition', *Asian Politics & Policy*, 7(4), pp. 575-596.
- Smith, N. (2018) 'Strategic hedging by smaller powers: What can neoclassical realism add?', *Re-Appraising Neoclassical Realism* [Preprint]. London, UK. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/328981014\\_Strategic\\_Hedging\\_by\\_Smaller\\_Powers\\_What\\_can\\_Neoclassical\\_Realism\\_Add](https://www.researchgate.net/publication/328981014_Strategic_Hedging_by_Smaller_Powers_What_can_Neoclassical_Realism_Add).
- Suorsa, O. (2017) 'Maintaining a small state's strategic space: omnidirectional hedging', *International Studies Association Hong Kong* [Preprint]. Available at: <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/f40db849-cb90-4826-9b7a-e449b602f398.pdf>.
- Tan, S.S. (2020) 'Consigned to hedge: Southeast Asia and America's "free and open Indo-Pacific" strategy', *International Affairs*, 96(1), pp. 131-148.
- Walt, S.M. (1987) *The Origins of Alliances*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Waltz, K.N. (1979) *Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley.

Wang, Y. (2021) 'Hedging strategy: Concept, behavior, and implications for China-ASEAN relations', *East Asian Affairs*, 1(2), p. 2150012. Available at: <https://doi.org/10.1142/S2737557921500121>.

Zhao, S. and Qi, X. (2016) 'Hedging and geostrategic balance of East Asian Countries toward China', *Journal of Contemporary China*, 25(100), pp. 1-15. Available at: <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132684>.


## PROFIL PENULIS



### **Munawir Siahaan, S.Sos, M.Si.**

Penulis memulai ketertarikannya dalam bidang Hubungan Internasional sejak 2016, yang mendorongnya untuk melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Pascasarjana Universitas Indonesia pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2022-2024. Dalam studi S2, penulis fokus pada kajian keamanan dengan spesialisasi di kawasan Timur Tengah, menganalisis dinamika politik dan isu-isu keamanan yang memengaruhi hubungan internasional di kawasan tersebut.

Sebagai seorang akademisi, penulis memiliki minat dalam bidang penelitian yang berkaitan dengan diplomasi internasional dan keamanan global. Pada tahun 2024, penulis memulai karirnya sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Sebagai dosen, penulis berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami kompleksitas isu-isu internasional, serta aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik seperti seminar dan konferensi. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemahaman tentang diplomasi dan kerjasama antarnegara di Indonesia.



**BAB 9**

**PENGARUH AI DAN  
DISRUPSI TEKNOLOGI  
DALAM HUBUNGAN  
INTERNASIONAL**

---

**Dhanang Fawaiz Akbar, S.IP., M.A.**  
Universitas Riau



## Pendahuluan

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan disrupsi teknologi merupakan dua fenomena yang semakin mendefinisikan dinamika hubungan internasional di era kontemporer. Perkembangan pesat teknologi AI telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi, keamanan, serta interaksi sosial antarnegara. Di sisi lain, disrupsi teknologi yakni perubahan radikal yang dihasilkan oleh inovasi teknologi baru menciptakan tantangan dan peluang tersendiri bagi negara-negara di dunia dalam mengatur kepentingan nasional, menjaga stabilitas, serta membentuk keterlibatan global.

AI sebagai salah satu inovasi teknologi utama menawarkan kemampuan analisis data yang luar biasa cepat dan akurat, memungkinkan negara-negara dan aktor internasional untuk merancang kebijakan serta strategi yang lebih responsif terhadap kondisi global yang dinamis dan kompleks. Di saat yang sama, disrupsi teknologi membuka ruang bagi pergeseran tatanan dunia lama yang berbasis pada kekuatan militer dan politik tradisional menuju era baru di mana kemampuan teknologi menjadi kunci utama dalam mempertahankan posisi tawar dan pengaruh global (Drezner, 2019). Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian baru dalam berbagai bidang, mulai dari diplomasi, keamanan siber, hingga perdagangan internasional.

Dalam hubungan internasional, AI dan teknologi digital juga mempercepat proses diplomasi dan interaksi antar negara melalui platform digital dan media sosial. Dalam buku *Diplomacy digital: Theory and Practice* dijelaskan bahwa diplomasi digital ini membuka peluang baru bagi negara-negara untuk membentuk opini publik global dan mempengaruhi agenda dunia secara langsung. Namun, disamping itu muncul pula tantangan besar seperti manipulasi informasi, penyebaran disinformasi, serta eskalasi konflik siber yang menuntut regulasi dan kerjasama internasional yang lebih kuat agar teknologi digunakan untuk perdamaian dan pembangunan bersama (Bjola and Holmes, 2015).

Disrupsi teknologi dan AI berperan besar dalam pergeseran ekonomi global dan pola perdagangan internasional. Negara yang

cepat beradaptasi dengan transformasi digital dapat meningkatkan daya saing dan mengambil alih posisi strategis dalam rantai nilai global, sementara negara lain berisiko tenggelam dalam ketertinggalan teknologi yang semakin memperlebar kesenjangan pembangunan antarnegara. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi komunitas internasional untuk mengembangkan kerangka kerja kolaboratif dan inklusif agar teknologi dapat dinikmati manfaatnya secara merata.

Adopsi pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah terbukti mempercepat efisiensi produksi dan memperkuat daya saing negara-menjadi pembeda antara negara yang memimpin dan yang tertinggal. Misalnya, AI ditengarai mampu menyempurnakan rantai pasok global melalui optimasi logistik, prediksi permintaan, dan automasi proses kepabeanan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global seperti Alibaba, DHL, dan Maersk. (Ozturk, 2024). Selain itu pada rantai nilai global, AI mendorong efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, memacu difusi inovasi, dan secara signifikan menurunkan biaya perdagangan tapi manfaat ini masih terkonsentrasi pada negara maju dengan infrastruktur teknologi kuat, sementara negara berkembang berisiko terperangkap dalam segmen bernilai rendah. Di sisi lain, penelitian di Asia Tenggara memperlihatkan bahwa adopsi AI secara signifikan meningkatkan volume perdagangan lintas batas, terutama di negara-negara dengan infrastruktur digital memadai dan regulasi mendukung ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar isu teknologi, tapi juga penentu posisi strategis dalam sistem ekonomi global (Cui, 2025).

Namun, kemajuan teknologi tinggi bukan tanpa risiko. Isu keamanan, etika, dan hak asasi manusia dalam penggunaan AI, termasuk pengembangan senjata otonom dan pengawasan digital, menuntut perhatian global yang serius. Artikel ini menempatkan pentingnya kajian mendalam mengenai pengaruh AI dan disrupsi teknologi dalam hubungan internasional sebagai sebuah kebutuhan akademik dan praktis yang mendesak. Pemahaman komprehensif terhadap fenomena ini akan menjadi landasan bagi negara-negara dan pelaku internasional untuk mengambil langkah yang adaptif dan

strategis dalam menghadapi perubahan global yang cepat dan kompleks.

### **Neorealisme dalam Konteks AI dan Disrupsi Teknologi**

Perspektif neorealisme memiliki peranan penting dalam menganalisis dampak transformasi digital dan pemanfaatan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) dalam hubungan internasional. Munculnya transformasi digital dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan negara untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh dalam sistem global, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks transformasi digital dan penggunaan teknologi, pandangan neorealisme dapat dijabarkan melalui beberapa poin. Pertama, dari perspektif neorealisme, kepentingan nasional adalah motivasi utama negara dalam memanfaatkan AI dan teknologi digital. Kenneth Waltz menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara bertindak untuk memaksimalkan kapabilitas material demi kelangsungan hidup (*survival*) (Waltz, 1979). Penerapan AI di sektor militer seperti sistem pengintaian berbasis AI milik Amerika Serikat seperti Project Maven dapat meningkatkan kemampuan analisis citra intelijen secara cepat, sehingga memberi keuntungan strategis (Probasco, 2024).

Kedua, dalam ranah keamanan, AI memicu tantangan baru berupa ancaman siber dan *surveillance*. Barry Buzan menjelaskan bahwa keamanan nasional mencakup ancaman non-militer yang dapat mengganggu stabilitas negara (Buzan and Hansen, 2012). Serangan siber terhadap infrastruktur kritis Estonia pada 2007, yang sebagian dianalisis sebagai bentuk konflik politik dengan Rusia, memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat menjadi instrumen kekuatan. Negara-negara merespons dengan membangun *cyber command* seperti US Cyber Command dan China's Strategic Support Force untuk melindungi aset vital. (Jason, 2021) Fenomena ini sejalan dengan konsep *security dilemma* di mana langkah defensif negara sering dipersepsikan ofensif oleh pihak lain, memicu eskalasi persaingan di bidang teknologi pertahanan.

## Daftar Pustaka

- Allen, G.C. and Goldston, I. (2025) 'Understanding U.S. Allies' Current Legal Authority to Implement AI and Semiconductor Export Controls'. Center for Strategic and International Studies.
- Anand, A. and Deng, H. (2023) *Towards Responsible Ai in Defence a Mapping and Comparative Analysis of Ai Principles Adopted By States*. Geneva, Switzerland. Available at: <https://unidir.org/files/2023-02/Brief-ResponsibleAI-Final.pdf>.
- Bjola, C. and Holmes, M. (2015) *Digital diplomacy : theory and practice, Routledge new diplomacy studies TA - TT* -. London SE -: Routledge. Available at: <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/887860572>.
- Boulanin, V. (2020) 'Limits on Autonomy in Weapon Systems: Identifying Practical Elements of Human Control', p. 53.
- Brundage, M. et al. (2018) *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. University of Cambridge. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.17863/CAM.22520>.
- Buzan, B. and Hansen, L. (2012) *International Security Studies post-Cold War: the traditionalists, The Evolution of International Security Studies*. Available at: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511817762.008>.
- Christie, E. and Ertan, A. (2022) 'NATO and Artificial Intelligence', *SSRN Electronic Journal*, pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.4133397>.
- Cui, J. (2025) 'The impact of artificial intelligence technology on cross-border trade in Southeast Asia: A meta-analytic approach', pp. 1–10. Available at: <https://arxiv.org/abs/2503.13529>.
- Deshpande, J. and Shinde, S. (2025) 'Wannacry Ransomware Attack : Lessons from a Global Cyber security Crisis Abstract: Introduction', *IJNRD2502097 International Journal Of Novel Research And Development*, 10(2), pp. 883–891.
- Drezner, D.W. (2019) 'Technological change and international

- relations', *International Relations*, 33(2), pp. 286–303. Available at: <https://doi.org/10.1177/0047117819834629>.
- Floridi, L. (2018) 'Soft Ethics and the Governance of the Digital', *Philosophy and Technology*, 31(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9>.
- Greg, A. and Taniel, C. (2017) *Artificial Intelligence and National Security*, *Belfer Center for Science and International Affairs*.
- Jason, B. (2021) 'The Global Spread of Cyber', pp. 233–255. Available at: [https://ccdcoc.org/uploads/2021/05/CyCon\\_2021\\_Blessing.pdf](https://ccdcoc.org/uploads/2021/05/CyCon_2021_Blessing.pdf).
- Kania, E. (2018) *China's AI Agenda Advances*, *The Diplomat*. Available at: <https://thediplomat.com/2018/02/chinas-ai-agenda-advances/>.
- Kania, E.B. (2020) 'Ai Weapons" in China'S Military Innovation', *Centre for Security and Emerging Technology*, (April), pp. 1–23.
- Kurlantzick, J. (2020) *China's Digital Silk Road Initiative: A Boon for Developing Countries or a Danger to Freedom?*, *The Diplomat*. Available at: <https://thediplomat.com/2020/12/chinas-digital-silk-road-initiative-a-boon-for-developing-countries-or-a-danger-to-freedom/>.
- Lingel, S. et al. (2020) *Joint All-Domain Command and Control for Modern Warfare: An Analytic Framework for Identifying and Developing Artificial Intelligence Applications*, *Joint All-Domain Command and Control for Modern Warfare: An Analytic Framework for Identifying and Developing Artificial Intelligence Applications*. RAND Corporation. Available at: <https://doi.org/10.7249/rr4408.1>.
- Little, R. (2007) *The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models*. Cambridge University Press.
- Ozturk, O. (2024) 'The Impact of AI on International Trade: Opportunities and Challenges', *Economies*, 12(11). Available at: <https://doi.org/10.3390/economies12110298>.
- Polyakova, A. and Meserole, C. (2019) 'Exporting digital

authoritarianism: The Russian and Chinese models', *Democracy and Disorder*, pp. 1–22. Available at: [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/08/FP\\_20190827\\_digital\\_authoritarianism\\_polyakova\\_meserole.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/08/FP_20190827_digital_authoritarianism_polyakova_meserole.pdf).

Probasco, E.S. (2024) 'Building the Tech Coalition How Project Maven and the U.S. 18th Airborne Corps Operationalized Software and Artificial Intelligence for the Department of Defense', (August). Available at: <https://cset.georgetown.edu/publication/building-the-tech-coalition/>.

Waltz, K.N. (1979) *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.

## PROFIL PENULIS



### **Dhanang Fawaiz Akbar, S.IP, M.A.**

Penulis adalah dosen pada Universitas Riau, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan Magister di bidang Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Bidang minat kajiannya meliputi diplomasi, kerja sama internasional, serta digitalisasi hubungan internasional, yang merefleksikan perhatiannya terhadap dinamika adaptasi interaksi global dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan latar belakang akademik yang solid dan pengalaman pengajaran yang memadai, ia secara aktif berkontribusi dalam pengembangan kajian kritis di bidang Hubungan Internasional dan tata kelola global. Selain menjalankan tugas pengajaran, ia juga melaksanakan kegiatan penelitian yang berupaya mengintegrasikan pendekatan diplomasi konvensional dengan tantangan global kontemporer, guna mendorong terwujudnya bentuk-bentuk kerja sama internasional yang lebih inklusif dan adaptif. Keterlibatannya dalam penyelenggaraan pendidikan baik secara luring maupun daring mencerminkan komitmennya dalam memperluas akses terhadap pendidikan serta memperkuat pertukaran akademik di berbagai konteks pembelajaran.

Author Email: [dhanang.fawaiz@lecturer.unri.ac.id](mailto:dhanang.fawaiz@lecturer.unri.ac.id)

# DIVERSITAS ISU SDGs

## DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perkembangan dunia yang semakin kompleks menuntut studi Hubungan Internasional (HI) untuk terus beradaptasi dan memperluas cakupan kajiannya. Jika pada masa awal disiplin ini berfokus pada negara dan isu keamanan tradisional, maka dinamika global kontemporer menunjukkan bahwa HI kini mencakup berbagai isu lintas sektor yang saling terhubung, mulai dari ekonomi, lingkungan, gender, hingga transformasi teknologi. Buku *Diversitas Isu SDGs dalam Hubungan Internasional* hadir untuk menggambarkan keragaman tersebut dengan menempatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka penting dalam memahami isu-isu global saat ini.

Buku ini mengajak pembaca melihat bagaimana hubungan internasional tidak lagi dapat dipahami hanya melalui perspektif “high politics” seperti keamanan dan kekuatan negara, tetapi juga melalui isu-isu pembangunan dan kesejahteraan manusia yang semakin relevan dalam agenda global. Melalui berbagai pembahasan tematik, buku ini menyoroti keterkaitan antara globalisme dan regionalisme, transformasi konsep keamanan internasional, dinamika kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN, serta munculnya isu-isu baru seperti diplomasi energi, keamanan manusia, dan ekonomi digital.

Selain itu, buku ini juga mengangkat perspektif kritis dalam studi HI, termasuk isu gender dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional. Pembahasan mengenai transisi energi, perubahan iklim, dan tantangan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa berbagai krisis global tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga memerlukan kerja sama lintas aktor dan lintas kawasan.